



MEP FEB UGM
committed to development



KAJIAN INDIKATOR KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU





LAPORAN AKHIR
KAJIAN INDIKATOR KINERJA EKONOMI
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Indramayu dengan
Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Tim Penyusun telah selesai menyusun Laporan Akhir dari Kajian Indikator Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Indramayu. Dengan adanya kajian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu mempunyai sebuah dokumen perencanaan yang berisi: (1) Analisis kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Indramayu; (2) Analisis *Location Quotient* (LQ); (3) Analisis *Shift Share*; (4) Analisis *Alternative Income*; serta (5) Analisis keberlanjutan sektor Pertanian dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu.

Apabila ada kekurangan dalam penyusunan kajian ini, kami Tim Penyusun dengan senang hati menerima saran dan masukan. Saran dan masukan sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan kajian ini dan sebagai pedoman pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Indramayu.

Yogyakarta, 5 Oktober 2018

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3. Ruang Lingkup	7
BAB 2 STUDI LITERATUR	8
2.1. Perekonomian Daerah	8
2.2. Isu Utama dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.....	9
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2.2. Pengangguran.....	11
2.2.3. Inflasi	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	16
3.1. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.2. Metode Analisis Data.....	16
3.2.1. Analisis Kuantitatif	16
3.2.2. Analisis Kualitatif	16
BAB 4 ANALISIS KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KABUPATEN	
INDRAMAYU.....	17
4.1. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	17
4.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	18
4.3. Inflasi	20
4.4. Ketimpangan Sektoral.....	21
4.5. Tingkat Keuntungan Sektoral	23
BAB 5 ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)	25
5.1. Metode Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	25
5.2. Hasil Perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ)	27
5.3. Hasil Perhitungan <i>Symmetric Location Quotient</i> (SLQ)	28
5.4. Hasil Perhitungan Dynamic SLQ	29
5.4.1. Metode Hitungan Statistik Deskriptif	30
5.4.2. Metode Hitungan Dinamis.....	31
BAB 6 ANALISIS SHIFT-SHARE	32



6.1. Metode Analisis <i>Shift-Share</i>	32
6.2. Hasil Perhitungan <i>Shift-Share</i>	33
BAB 7 ANALISIS <i>ALTERNATIVE INCOME</i>	36
7.1. Pentingnya <i>Alternative Income</i>	36
7.2. Analisis Tipologi Klassen	37
7.3. Pendapatan per Pekerja	39
7.4. Elastisitas Tenaga Kerja terhadap PDRB.....	40
7.5. Respon Masyarakat Tani.....	42
BAB 8 ANALISIS KEBERLANJUTAN SEKTOR PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH	43
8.1. Pengentasan Kemiskinan di Sektor Pertanian	43
8.2. Analisis Isu Strategis	47
8.3. Strategi Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Indramayu	49
BAB 9 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
9.1. Kesimpulan	53
9.2. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pendekatan Konvensional: Kebutuhan Pemahaman Indikator dan Keterkaitannya	8
Gambar 2.2 Kurva Kuznet	11
Gambar 2.3 <i>Demand-Pull</i> dan <i>Cost-Push Inflation</i>	13
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu, 2010-2017 (%)	19
Gambar 4.2 Indeks Ketimpangan Sektoral Kabupaten Indramayu, 2010-2016	22
Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu, 2002-2017	37
Gambar 7.2 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Indramayu, 2010-2017	38
Gambar 8.1 Teori Lokasi Sektor Jasa, Manufaktur dan Pertanian	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elastisitas Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2004-2015.....	10
Tabel 4.1 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Indramayu, 2010-2017 (%)	17
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (%).....	19
Tabel 4.3 Inflasi Kabupaten Indramayu dengan Perhitungan PDRB Deflator, 2010-2017 (%)	21
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan PCM Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (%).....	23
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Indramayu, 2010-2017.....	28
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan SLQ Kabupaten Indramayu, 2010-2017.....	29
Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Pola Spesialisasi Sektoral di Indramayu	30
Tabel 6.1 Hasil Perhitungan <i>Shift-Share</i> Kabupaten Indramayu, 2010-2017	34
Tabel 7.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2015.....	36
Tabel 7.2 Pendapatan per Pekerja per Tahun di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2013 (Rp Ribu/Jiwa/Tahun)	39
Tabel 7.3 Pertumbuhan Pendapatan per Pekerja di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2013 (%).....	40
Tabel 7.4 Elastisitas Tenaga Kerja terhadap PDRB, 2007-2013.....	41
Tabel 8.1 Elastisitas Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu, 2010-2017	46
Tabel 8.2 Analisis Isu Strategis Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Indramayu memiliki potensi ekonomi yang berbasis sektor pertanian. Hingga saat ini, Kabupaten Indramayu masih menjadi lumbung padi di Provinsi Jawa Barat. Produksi padi sawah dan padi ladang Kabupaten Indramayu menyumbang masing-masing sebesar 11,36 persen dan 11,72 persen terhadap total produksi padi sawah dan padi ladang Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 (BPS, 2017b). Bahkan pada tahun 2016, produksi padi dari Kabupaten Indramayu menjadi penyumbang terbesar terhadap produksi padi Provinsi Jawa Barat (BPS, 2018b). Namun, pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Indramayu (13,67 persen) hanya lebih rendah daripada Kota Tasikmalaya (14,8 persen) untuk wilayah Provinsi Jawa Barat (BPS, 2017a).

Sumarto dan Suryahadi (2007) meneliti peran pertanian dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan menemukan bahwa pertanian memiliki peran yang signifikan. Bhattacharyya dan Resosudarmo (2015) menemukan bahwa pertumbuhan di sektor non-pertambangan signifikan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini terjadi karena di Indonesia akses penduduk miskin terhadap sektor pertambangan relatif lebih rendah daripada akses terhadap sektor non-pertambangan, terutama sektor pertanian dan jasa di perkotaan. Meskipun demikian, sektor pertanian hanya mampu mengatasi masalah kemiskinan relatif saja. Hal ini terjadi karena pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang sebelumnya menganggur dan kemudian memilih bekerja di sektor pertanian lebih kecil daripada tenaga kerja di sektor-sektor lain. Meskipun pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian bertambah, namun secara rata-rata pendapatan mereka masih berada di bawah garis kemiskinan (Christiaensen *et al.*, 2011), sehingga kemiskinan absolut belum sepenuhnya bisa teratasi.

Fenomena seperti itu juga terjadi di Kabupaten Indramayu, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar angkatan kerjanya memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara lain. Pada tahun 2015, jumlah TKI dari Kabupaten

Indramayu yang bekerja di luar negeri mencapai 16.735 jiwa (BPS, 2017) atau sekitar 51,47 persen dari total TKI dari Provinsi Jawa Barat yang bekerja di luar negeri. Pada tahun yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Indramayu mencapai 8,51 persen, relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Indramayu menghadapi masalah yang cukup serius dalam menciptakan lapangan kerja di daerahnya. Jika tidak menjadi TKI, mungkin saja TPT Kabupaten Indramayu lebih tinggi daripada angka tersebut. Ditambah pertumbuhan ekonomi yang melambat selama beberapa tahun terakhir, bahkan pada tahun 2016 hanya mencapai 0,08%, masalah pembangunan ekonomi di Kabupaten Indramayu menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, Kabupaten Indramayu membutuhkan kajian indikator kinerja ekonomi daerah sebagai pedoman untuk merencanakan pembangunan ekonomi di masa mendatang sehingga perekonomiannya bisa lebih baik daripada sekarang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang berisi analisis indikator-indikator ekonomi daerah di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai adalah melakukan analisis indikator-indikator ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian yang dapat digunakan untuk proses monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Indramayu.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian indikator kinerja ekonomi daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

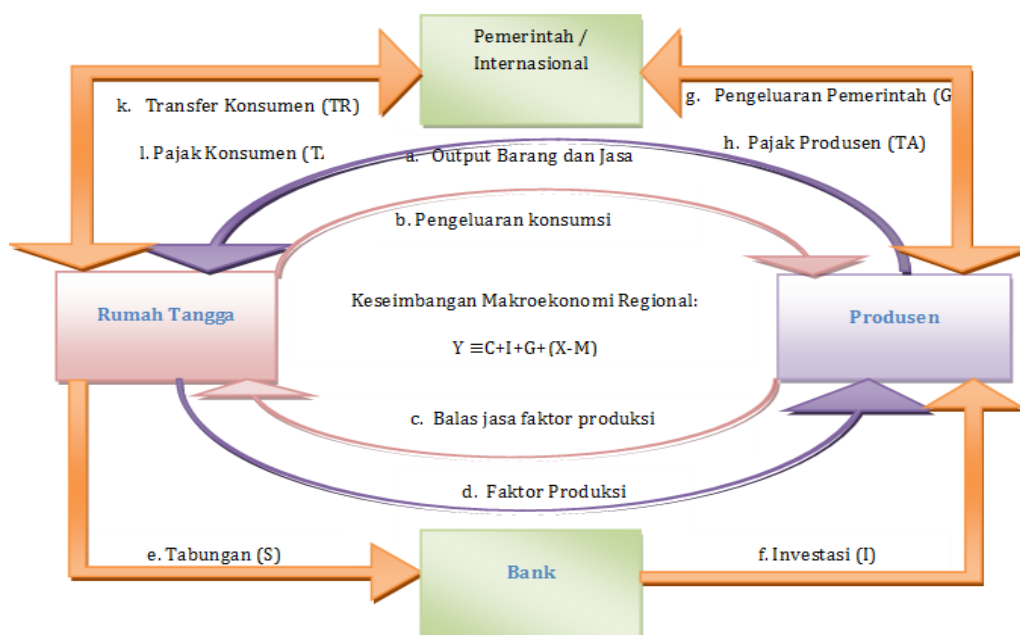
1. Melakukan analisis kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Indramayu;
2. Melakukan analisis *Location Quotient* (LQ)
3. Melakukan analisis *Shift Share*
4. Melakukan analisis *Alternative Income*
5. Melakukan analisis keberlanjutan sektor Pertanian dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu.

BAB 2

STUDI LITERATUR

2.1. Perekonomian Daerah

Perekonomian suatu daerah menggunakan kerangka berpikir aliran melingkar perekonomian seperti ditunjukkan Gambar 2.1. Empat agen pelaku ekonomi regional yang menentukan perkembangan ekonomi daerah rumah tangga, produsen, bank dan pemerintah ataupun masyarakat internasional. Keempat pelaku tersebut saling berinteraksi dan saling melakukan transaksi ekonomi di suatu wilayah daerah. Transaksi-transaksi tersebut kemudian menghasilkan pendapatan, tabungan ataupun investasi. Namun, ada juga yang harus dikeluarkan dalam transaksi tersebut, seperti pajak dan belanja. Transaksi-transaksi tersebut menentukan pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga dibutuhkan indikator-indikator ekonomi tertentu untuk mengukurnya dan merumuskan kebijakan yang tepat.



Gambar 2.1 Pendekatan Konvensional: Kebutuhan Pemahaman Indikator dan Keterkaitannya



2.2. Isu Utama dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum, ada tiga isu utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga isu utama tersebut antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) pengangguran; dan (3) inflasi. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci tiga isu utama tersebut.

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Suatu pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya diukur dengan perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Semakin tinggi perubahan nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya.

Secara teoretis pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan fenomena *trickle down effect* (efek meresap ke bawah), yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan perekonomian akibat adanya pertumbuhan. Perubahan-perubahan yang membawa perbaikan pada kehidupan masyarakat miskin antara lain perbaikan jasa yang disediakan pemerintah (kesehatan, pendidikan, asuransi) dan kenaikan inklusifitas pasar tenaga kerja terhadap masyarakat berpendidikan rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan *trickle-down effect* sering disebut sebagai pertumbuhan inklusif.

Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan perbaikan kondisi masyarakat miskin. Masyarakat yang berada pada tingkatan pendapatan teratas cenderung memiliki kemampuan lebih untuk mengalami perbaikan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya terjadi sebatas pada masyarakat yang berpendapatan tinggi. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan bawah memiliki *endowment* dan kualitas sumber daya manusia yang kecil sehingga cenderung sulit untuk mengalami peningkatan pendapatan. Pertumbuhan yang non-inklusif seperti ini akan ditandai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Tinjauan empiris terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menemukan bahwa nilai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah -0.27

(lihat Tabel 2.1). Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,27 persen, *ceteris paribus*.

Tabel 2.1 Elastisitas Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2004-2015

Tahun	Pertumbuhan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Elastisitas
2004	5.05	16.7	
2005	5.69	16	-0.35
2006	5.5	17.8	-3.14
2007	6.35	16.6	0.49
2008	6.1	15.4	1.87
2009	4.63	14.2	0.29
2010	6.22	13.3	-0.22
2011	6.49	12.5	-1.46
2012	6.23	11.7	1.62
2013	5.78	11.4	0.35
2014	5.02	11.25	0.09
2015	4.75	12.25	-1.54
		Rata-rata	-0.27

Sumber: Kalkulasi Peneliti (2018).

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dialami oleh golongan berpendapatan tinggi, maka pertumbuhan akan terjadi dibarengi dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan yang inklusif akan dibarengi oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Secara teoretis, hubungan ini disebut sebagai *Kuznet's Inverted U Hypothesis*, yang digambarkan dalam bentuk kurva U terbaik (Gambar 2.2). Hipotesis ini menyebutkan bahwa pada tingkat awal pembangunan (nilai pendapatan per kapita rendah) pertumbuhan yang terjadi akan dibarengi oleh kenaikan ketimpangan pendapatan. Namun, ketika perekonomian semakin bergerak maju, pertumbuhan yang terjadi akan cenderung bersifat inklusif, sehingga pertumbuhan yang terjadi akan menurunkan ketimpangan pendapatan.



Gambar 2.2 Kurva Kuznet

2.2.2. Pengangguran

Suatu pemerintah daerah juga perlu memastikan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga angka pengangguran bisa ditekan seminimal mungkin. Ada tiga indikator yang umum digunakan untuk mengukur kesempatan kerja di suatu daerah, yaitu: Rasio Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio, DR*) adalah rasio antara jumlah penduduk usia produktif (NUP) dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (NUTP). Dengan demikian, rasio ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$DR = \frac{NUTP}{NUP}$$

Semakin tinggi rasio ketergantungan, berarti semakin banyak jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif. Sebagai contoh, apabila rasio ketergantungan sama dengan 20, maka artinya setiap penduduk usia produktif menanggung 20 penduduk usia tidak produktif.

Pada kenyataannya, terdapat penduduk yang masuk dalam usia produktif tetapi tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, tidak semua penduduk usia produktif yang bekerja. Angkatan kerja, disimbolkan AK, (*labor force*) adalah penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase jumlah penduduk usia produktif yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan (AK) terhadap total jumlah penduduk usia produktif (NUP). Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

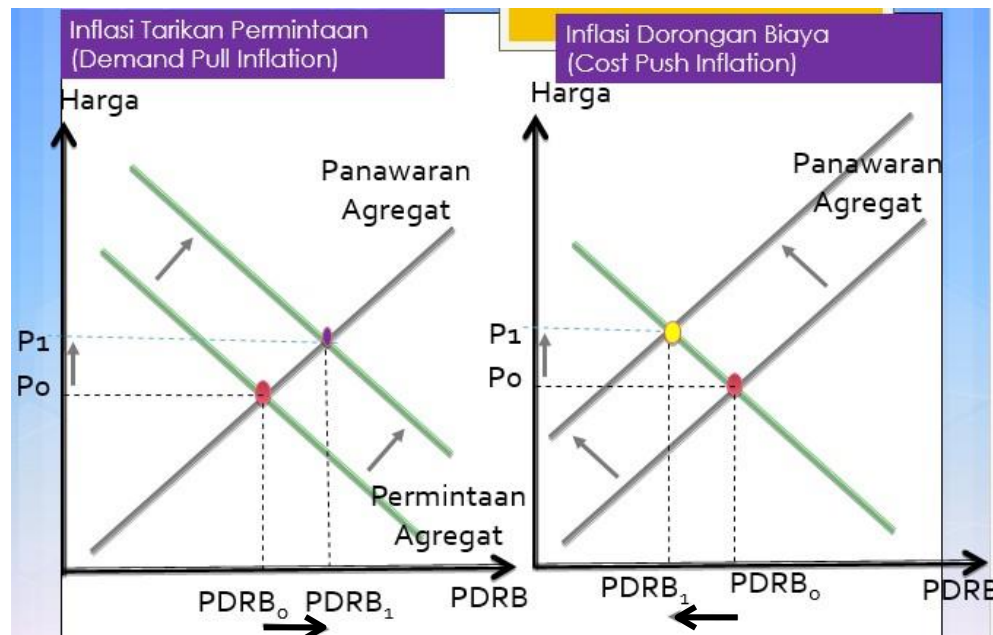
$$TPAK = \frac{AK}{NUP} \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (*Open Employment Rate, OUR*). Pengangguran terbuka terdiri dari: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Jika jumlah penduduk usia kerja yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan kita simbolkan dengan (NUPTB) dan jumlah penduduk usia kerja yang sudah bekerja kita simbolkan seperti di atas (AK), maka tingkat pengangguran terbuka dapat dirumuskan sebagai:

$$OUR = \frac{NUPTB}{AK} \times 100\%$$

2.2.3. Inflasi

Di samping pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, isu lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi. Inflasi yang stabil dan terkendali akan menciptakan perekonomian yang stabil. Suatu pemerintah daerah perlu memahami bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Demand-pull inflation*, atau inflasi tarikan permintaan, adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa pada saat tertentu. Sedangkan *cost-push inflation*, atau inflasi dorongan penawaran, adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Secara grafis, perbedaan kedua jenis inflasi ini dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Demand-Pull dan Cost-Push Inflation

Pada kasus *demand-pull inflation*, kenaikan harga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gambar di atas ditunjukkan oleh kenaikan P_0 ke P_1 yang menyebabkan permintaan agregat bergeser ke kanan (PDRB naik). Sementara itu, pada kasus *cost-push inflation*, kenaikan harga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gambar di atas ditunjukkan oleh kenaikan P_0 ke P_1 yang menyebabkan permintaan agregat bergeser ke kiri (PDRB turun). Dengan demikian, jika di suatu daerah terjadi inflasi, maka perlu diidentifikasi faktor penyebabnya. Karena berbeda faktor penyebab, maka kebijakan untuk mengatasinya juga berbeda.

Inflasi sering dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB deflator. Secara matematis bentuk formula inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P adalah harga dan t adalah waktu.

Dasar harga yang dipergunakan dalam perhitungan inflasi adalah harga konsumen (*consumer price index*, CPI), indeks harga produsen (*producer price index*, PPI) atau deflator PDRB. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dua indeks pertama kebanyakan tidak dimiliki oleh daerah, sehingga perhitungan inflasi sering dilakukan dengan menggunakan PDRB deflator. PDRB deflator memiliki nilai lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari satu. Nilai deflator PDRB lebih besar atau sama dengan satu berarti harga-harga umum mengalami peningkatan atau paling tidak sama. Sebaliknya, nilai deflator PDRB lebih kecil dari satu berarti harga-harga umum mengalami penurunan. Deflator PDRB dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Deflator PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Harga Berlaku}}}{\text{PDRB}_{\text{Harga Konstan}}}$$

PDRB deflator adalah rasio antara PDRB nominal (atas harga berlaku) dan PDRB riil (atas harga konstan). PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah diukur dengan harga berlaku saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = \sum_1^n P_i Q_i$$

di mana harga P_i yang dipakai untuk perhitungan adalah harga berlaku saat output diproduksi (tahun berjalan). Sementara itu, PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Dalam perhitungan PDRB harga konstan, faktor perubahan harga telah dikeluarkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = \sum_1^n \bar{P}_i Q_i$$

di mana harga \bar{P}_i yang dipakai untuk perhitungan adalah harga tahun dasar (*base year*). Dengan demikian:

$$\text{deflator PDRB}_t = \frac{\text{PDRB}_{\text{nominal}}_t}{\text{PDRB}_{\text{riil}}_t} 100\%$$

Dengan menggunakan indeks ini, inflasi dapat dirumuskan:

$$\text{INF}_t = \frac{\text{deflatorPDRB}_t - \text{deflatorPDRB}_{t-1}}{\text{deflatorPDRB}_{t-1}} 100\%$$

Data *Consumer Price Index* dan *Producer Price Index* biasanya tidak dimiliki oleh setiap daerah, sehingga perhitungan inflasi dapat dilakukan dengan menggunakan PDRB deflator. Perbedaan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB deflator adalah (Mankiw, 2011):

1. PDRB deflator mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan IHK mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. IHK membandingkan sekeranjang barang dan jasa yang tetap terhadap tahun dasar, sedangkan PDRB deflator membandingkan sekeranjang barang dan jasa yang diproduksi saat ini terhadap tahun dasar. Jadi, sekelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB deflator berubah dari waktu ke waktu.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam kajian ini ada yang bersifat sekunder dan ada yang primer. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Indramayu, serta SKPD terkait di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, data primer diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Indramayu dan observasi di lapangan.

3.2. Metode Analisis Data

Kajian ini akan menggunakan dua jenis pendekatan dalam analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah rinciannya.

3.2.1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif akan digunakan pada Bab 4 hingga Bab 7. Analisis ini mencakup analisis kontribusi sektoral, analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift-Share*. Di dalam analisis kontribusi sektoral nantinya akan diuraikan juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu, inflasi dengan menggunakan PDRB deflator dan ketimpangan sektoral. Sementara itu, di dalam analisis LQ nantinya akan diuraikan *Symmetric Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic SLQ*. Dalam Bab 7 akan diuraikan mengenai indikator tenaga kerja sektoral untuk mengidentifikasi tingkat pendapatan pekerja di Kabupaten Indramayu.

3.2.2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif akan digunakan pada Bab 7 hingga Bab 8. Analisis ini mencakup analisis *Alternative Income* dan keberlanjutan sektor Pertanian dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu. Analisis-analisis ini didasarkan pada hasil FGD dan observasi di lapangan.



BAB 4

ANALISIS KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KABUPATEN INDRAMAYU

4.1. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB

Analisis kontribusi sektoral dilakukan untuk melihat seberapa besar peran suatu sektor terhadap PDRB Kabupaten Indramayu. Dasar perhitungan dalam analisis ini adalah PDRB Kabupaten Indramayu atas dasar harga berlaku seri 2010. Hasil perhitungan kontribusi sektoral dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Indramayu, 2010-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,41	14,86	14,71	15,55	15,68	17,94	19,75	19,19
2	Pertambangan dan Penggalian	15,28	18,40	19,84	18,14	15,91	9,33	7,33	7,07
3	Industri Pengolahan	49,84	46,37	44,52	43,73	44,28	44,69	43,35	43,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,10	0,11
6	Konstruksi	3,68	3,79	3,60	3,91	4,40	5,32	5,59	6,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,25	8,33	8,87	9,66	10,07	11,09	11,28	11,30
8	Transportasi dan Pergudangan	1,73	1,67	1,63	1,87	2,13	2,66	2,99	3,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,08	1,15	1,21	1,31	1,54	1,65	1,77
10	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45	0,54	0,61	0,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	0,81	0,83	0,88	0,92	1,09	1,22	1,30
12	Real Estat	0,37	0,35	0,36	0,37	0,38	0,43	0,47	0,50
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,22	0,24	0,25
14	Jasa Perusahaan	1,97	1,84	1,87	1,88	1,92	2,28	2,35	2,35
15	Jasa Pendidikan	1,21	1,20	1,31	1,44	1,58	1,90	2,09	2,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,30	0,31	0,32	0,35	0,45	0,50	0,53
17	Jasa lainnya	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,39	0,43	0,46

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 19,19 persen terhadap PDRB Kabupaten Indramayu pada tahun 2017. Meskipun terus meningkat

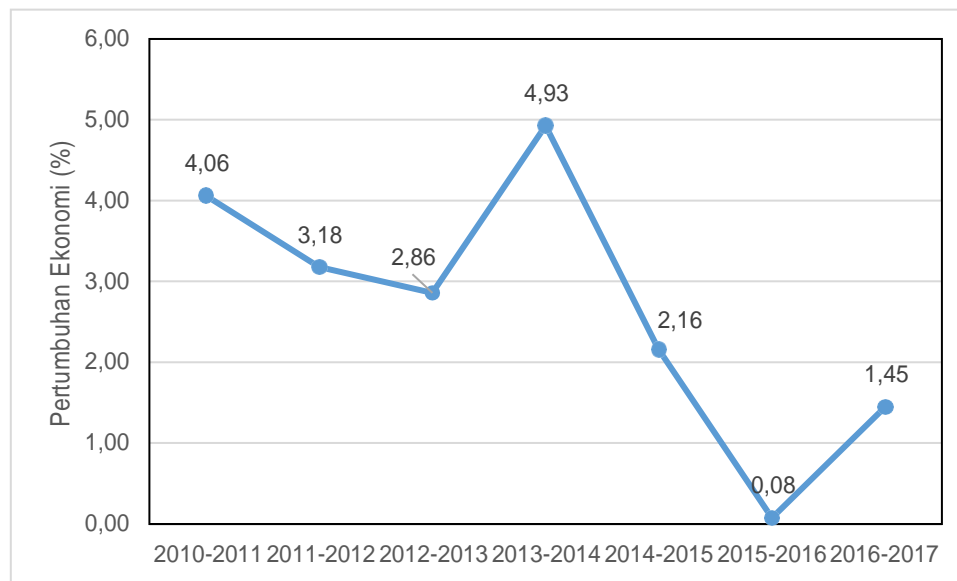
dari tahun 2010, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih di bawah sektor Industri Pengolahan. Menariknya, meskipun sektor Industri Pengolahan kontribusinya selalu paling besar selama 2010-2017, namun kontribusinya terus menurun. Di sisi lain, sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa, seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Indramayu selama periode tersebut terus meningkat. Kasus Kabupaten Indramayu termasuk anomali, karena di saat sektor industri pengolahan dan pertanian masih dominan, sektor-sektor jasa juga menggeliat. Kasus ini berbeda dengan fenomena umum di mana suatu perekonomian bertransformasi dari pertanian ke industri lalu ke jasa.

Sektor-sektor lain yang kontribusinya meningkat selama 2010-2016 antara lain: (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Konstruksi; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan dan Asuransi; (6) Real Estat; (7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (8) Jasa Perusahaan; (9) Jasa Pendidikan; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta (11) Jasa lainnya. Sementara itu, sektor lain yang kontribusinya menurun selama periode tersebut adalah Pertambangan dan Penggalan. Turunnya kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalan tidak terlepas dari turunnya harga minyak di pasar dunia serta turunnya produksi minyak dan gas di PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu selama 2010-2017 dilakukan dengan data PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan tahun 2010. Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.2 berikut. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu cenderung menurun. Pada tahun 2011, perekonomian Kabupaten Indramayu tumbuh sebesar 4,06 persen dari tahun sebelumnya dan terus menurun hingga mencapai 0,08 persen pada tahun 2016. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2014, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tidak meningkat lagi selama dua tahun

berikutnya. Baru pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu meningkat lagi menjadi sebesar 1,45 persen. Jika dirata-rata untuk periode tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu mencapai 2,44 persen. Angka tersebut masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 sampai 5,4 persen. Kasus Kabupaten Indramayu ini menjadi anomali karena polanya berbeda dengan daerah-daerah lain.



Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu, 2010-2017 (%)
 Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,51	2,65	4,51	2,04	0,94	7,40	-1,43	2,69
2	Pertambangan dan Penggalian	4,70	10,02	3,55	1,86	1,41	-9,88	-3,46	0,58
3	Industri Pengolahan	2,33	-1,17	0,27	5,18	0,41	-1,17	1,54	0,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,78	6,88	5,67	7,29	5,74	3,53	5,56	5,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,77	11,05	11,07	10,85	8,72	6,41	8,03	9,35
6	Konstruksi	7,50	9,05	6,27	7,43	9,39	4,96	8,47	7,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	8,94	8,03	8,43	3,80	1,62	3,22	5,67
8	Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,03	8,27	12,06	9,25	8,32	6,01	8,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,75	8,00	5,49	7,98	6,93	5,53	8,33	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	14,13	8,23	6,46	14,91	15,34	13,99	12,19	11,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,29	9,07	7,37	7,30	8,20	8,34	6,45	7,79



No.	Lapangan Usaha	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rerata
12	Real Estat	3,73	5,46	6,48	6,81	6,79	8,73	9,09	7,23
13	Jasa Perusahaan	2,88	7,63	5,06	5,89	8,18	6,94	8,70	7,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,35	5,58	-0,34	2,60	5,32	2,56	1,21	2,82
15	Jasa Pendidikan	6,67	16,74	9,74	13,84	10,58	8,46	8,62	11,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	5,63	5,79	13,39	13,21	8,21	8,53	9,13
17	Jasa lainnya	7,86	4,00	4,17	6,79	9,96	6,41	9,55	6,81
	PDRB TOTAL	4,06	3,18	2,86	4,93	2,16	0,08	1,45	2,44

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Meskipun kontribusinya besar, namun pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan relatif lambat dibandingkan dengan sektor-sektor lain selama 2010-2017. Sektor yang rata-rata tumbuh paling cepat selama 2010-2017 adalah Informasi dan Komunikasi (11,85 persen), lalu diikuti oleh Jasa Pendidikan (11,33 persen) serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (9,35 persen). Sementara itu, sektor yang rata-rata tumbuh paling lambat adalah Pertambangan dan Penggalian (0,58 persen) lalu diikuti oleh Industri Pengolahan (0,84 persen) serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,69 persen).

4.3. Inflasi

Hasil perhitungan inflasi Kabupaten Indramayu pada periode 2010-2016 dengan metode PDRB Deflator dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. Secara umum, inflasi rata-rata seluruh sektor di Kabupaten Indramayu masih tergolong rendah dan terkendali. Inflasi rata-rata sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (8,21 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (8,12 persen) paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sementara itu, ada dua sektor yang inflasi rata-ratanya negatif (deflasi), yaitu Pertambangan dan Penggalian (-11,19 persen) serta Informasi dan Komunikasi (-0,04 persen). Secara keseluruhan Kabupaten Indramayu pernah mengalami deflasi, yaitu pada tahun 2015 (-6,52 persen), yang disebabkan oleh tingginya deflasi di sektor Pertambangan dan Penggalian.



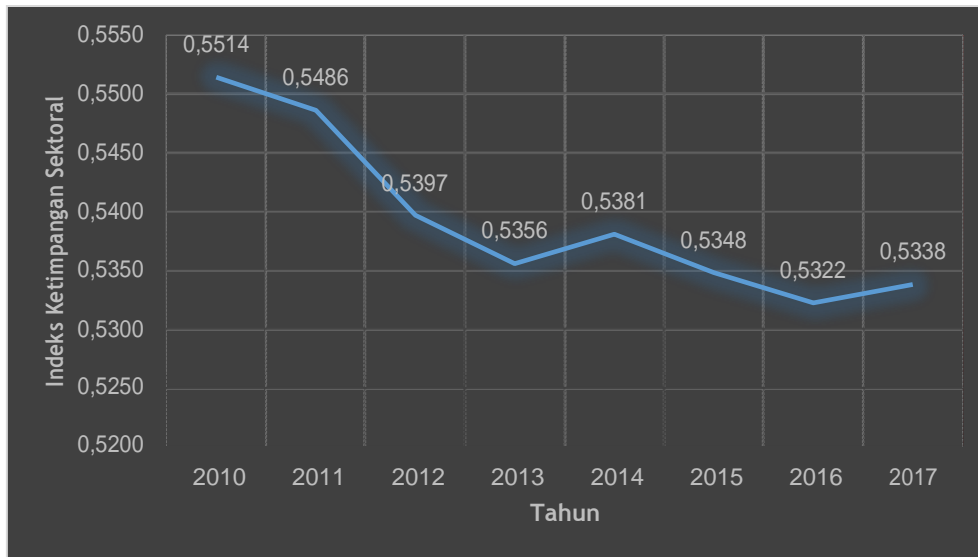
Tabel 4.3 Inflasi Kabupaten Indramayu dengan Perhitungan PDRB Deflator, 2010-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,58	6,37	9,16	7,04	12,79	6,05	5,43	7,81
2	Pertambangan dan Penggalian	30,12	9,71	-8,20	-10,56	-53,38	-7,70	2,99	-11,19
3	Industri Pengolahan	2,88	6,70	4,89	3,22	-3,28	-0,26	3,22	2,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,58	-0,36	-0,12	6,89	14,98	8,05	14,17	7,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,06	6,52	10,09	0,15	7,11	18,19	7,11	8,21
6	Konstruksi	8,52	-4,88	9,18	13,56	8,67	2,42	5,46	5,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	7,57	8,64	3,21	3,24	2,34	2,54	4,59
8	Transportasi dan Pergudangan	2,07	0,01	13,64	9,57	13,43	7,70	4,37	8,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	8,68	6,78	8,18	7,69	4,44	5,39	6,86
10	Informasi dan Komunikasi	-0,51	-0,42	0,30	-1,76	-0,04	0,23	1,45	-0,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	3,94	5,81	4,25	6,99	6,15	6,65	5,63
12	Real Estat	4,36	5,18	4,86	1,80	3,90	2,09	2,06	3,31
13	Jasa Perusahaan	3,88	3,26	6,48	5,23	6,01	4,18	-0,77	4,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	5,42	8,46	7,52	10,95	3,08	5,00	6,74
15	Jasa Pendidikan	5,95	2,06	7,35	3,69	6,01	4,02	6,57	4,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,61	8,37	4,51	2,73	12,50	5,88	4,31	6,38
17	Jasa lainnya	2,24	6,60	5,62	3,09	6,87	6,06	2,68	5,16
	PDRB TOTAL	8,74	6,80	4,23	2,15	-6,52	1,82	4,16	2,11

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

4.4. Ketimpangan Sektoral

Ketimpangan sektoral dapat diukur dengan Indeks Ketimpangan Sektoral. Dalam penghitungan indeks ini, sektor-sektor penyumbang PDRB dibedakan menjadi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Ketiga kategori tersebut kemudian diberi bobot masing-masing 0,4 untuk sektor primer dan sekunder serta 0,2 untuk sektor tersier. Semakin rendah nilai indeks ini maka aktivitas ekonomi di suatu negara/daerah semakin terdiversifikasi, begitu pula sebaliknya. Gambar 4.2 berikut menunjukkan hasil perhitungan Indeks Ketimpangan Sektoral Kabupaten Indramayu dari tahun 2010-2017. Dari gambar ini terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir terjadi diversifikasi aktivitas ekonomi (ketimpangan sektoral menurun) di Kabupaten Indramayu.



Gambar 4.2 Indeks Ketimpangan Sektoral Kabupaten Indramayu, 2010-2016
Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Selanjutnya, untuk memperkuat argumen tersebut, kita akan menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh ketimpangan sektoral. Secara teoretis, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan dibarengi oleh peningkatan ketimpangan sektoral. Namun, seiring dengan pembangunan ekonomi yang menginjak tahap lanjut, ketimpangan akan semakin berkurang karena pertumbuhan yang terjadi semakin inklusif dan fenomena *trickle-down effect* semakin berpengaruh.

Cara untuk membuktikan keberadaan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan di perekonomian Indramayu adalah dengan menggunakan analisis regresi. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2^2 \quad (4.2)$$

Di mana β_0 adalah konstanta, CV adalah *coefficient variation*, β_1 dan β_2 adalah koefisien yang menunjukkan sumbangan antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Hasilnya adalah sebagai berikut:

$$Y = -12.039 + 43.519 X_1 - 39.204 X_2^2 \quad (4.2)$$

Baik β_1 maupun β_2 ditemukan tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu tidak didasari oleh ketimpangan sektoral. Artinya, pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 – 2017 sudah bersifat inklusif.



4.5. Tingkat Keuntungan Sektoral

Untuk menghitung tingkat keuntungan sektoral, pertama-tama kita harus menghitung nilai elastisitas. Nilai elastisitas diperoleh dengan cara membagi persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan (pertumbuhan ekonomi) dengan persentase perubahan PDRB atas dasar harga berlaku (inflasi). Dari perhitungan elastisitas, dapat diperoleh nilai *Price Contribution Margin* (PCM). PCM diperoleh dari rumus berikut (Besanko et al., 2010).

$$PCM = \frac{P - MC}{P} = \frac{1}{\varepsilon}$$

di mana P adalah harga, MC adalah biaya marjinal dan ε adalah elastisitas. Hasil perhitungan PCM dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Meskipun kontribusinya terus menurun dan pernah menjadi penyumbang deflasi terbesar, namun sektor Pertambangan dan Penggalian masih paling menguntungkan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata PCM yang mencapai 7,84 persen, yang berarti bahwa rata-rata nilai output sektor Pertambangan dan Penggalian 7,84 persen lebih tinggi daripada sektor-sektor lain. Sektor lain yang memiliki nilai PCM yang tinggi antara lain: (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,43 persen); (2) Industri Pengolahan (5,13 persen); serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,00 persen). Sementara itu, sektor-sektor lain memiliki nilai PCM di bawah 1,5 persen.

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan PCM Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,92	2,40	2,03	3,46	13,56	0,82	3,81	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	6,41	0,97	2,31	5,68	37,86	0,78	0,86	7,84
3	Industri Pengolahan	1,23	5,73	17,87	0,62	8,11	0,23	2,09	5,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,05	0,02	0,95	2,61	2,28	2,55	1,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,75	0,59	0,91	0,01	0,82	2,84	0,89	0,97
6	Konstruksi	1,14	0,54	1,46	1,82	0,92	0,49	0,64	1,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83	0,85	1,08	0,38	0,85	1,44	0,79	0,89



No.	Lapangan Usaha	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	Rerata
8	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,00	1,65	0,79	1,45	0,93	0,73	0,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38	1,09	1,23	1,03	1,11	0,80	0,65	0,90
10	Informasi dan Komunikasi	0,04	0,05	0,05	0,12	0,00	0,02	0,12	0,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,43	0,79	0,58	0,85	0,74	1,03	0,71
12	Real Estat	1,17	0,95	0,75	0,26	0,57	0,24	0,23	0,60
13	Jasa Perusahaan	1,35	0,43	1,28	0,89	0,73	0,60	0,09	0,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,55	0,97	25,17	2,89	2,06	1,20	4,14	5,43
15	Jasa Pendidikan	0,89	0,12	0,75	0,27	0,57	0,48	0,76	0,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	1,49	0,78	0,20	0,95	0,72	0,51	1,09
17	Jasa lainnya	0,29	1,65	1,35	0,46	0,69	0,95	0,28	0,81

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).



BAB 5

ANALISIS *LOCATION QUOTIENT* (LQ)

5.1. Metode Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat kemandirian suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan *industry basic*.
2. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan *industry non-basic* atau *industry local*.

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori basis ekonomi, yaitu karena *industry basic* menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap *industry basic*, tetapi juga menaikkan permintaan akan *industry non-basic (local)*. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang mendorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Oleh karena itu, industri basis-lah yang patut di kembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah termasuk *industry basic* atau *non basic*. Untuk keperluan ini, maka teknik yang sering dipakai adalah *Location Quotient* (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.



Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan. Misalnya dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adalah jumlah tenaga kerja yang diserap. Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan daerah, maka ukuran dasar yang dipakai adalah besarnya kenaikan yang diciptakan di daerah. Misalkan pendapatan (nilai tambah) industri tekstil daerah A sebesar Rp10 juta, sedang pendapatan total daerah tersebut sebesar Rp250 juta, maka industri tekstil tersebut mempunyai peranan relatif (*relative importance*) sebesar $10/250 \times 100\% = 4\%$. Jika pendapatan industri tekstil di seluruh negara sebesar Rp100 juta, sedang pendapatan total negara adalah Rp500 juta, maka peranan relatif industri tekstil adalah $100/5.000 \times 100\% = 2\%$.

Dari penjelasan di atas, maka indeks LQ dapat dihitung dengan cara lain yaitu dengan membandingkan pendapatan yang berasal dari industri tekstil di daerah dengan pendapatan dari seluruh industri tekstil yang ada dalam suatu negara yaitu $10 \text{ juta} / 100 \text{ juta} \times 100\% = 10\%$ kemudian dibagi dengan perbandingan pendapatan seluruhnya di daerah A dengan pendapatan total negara yaitu $\text{Rp}250 \text{ juta} / \text{Rp}5.000 \text{ juta} \times 100\% = 5\%$. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui berapa LQ industri tekstil di daerah A yaitu $10/5 = 2$. Rumus menghitung LQ adalah:

$$LQ = \frac{V_i^* / V_t^*}{V_i / V_t} = \frac{V_i^* / V_i}{V_t^* / V_t}$$

- V_i^* adalah pendapatan dari industri di suatu daerah.
- V_t^* adalah pendapatan total daerah tersebut.
- V_i adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional / nasional.
- V_t adalah pendapatan regional / nasional.

Asumsi teknik ini adalah semua penduduk di seluruh daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. Sebagai contoh, indeks LQ di daerah industri A adalah 1 (satu) berarti daerah tersebut dapat “mengekspor” hasil industri tekstil ke daerah lain. Atau, indeks LQ sebesar 1,5 atau $3/2$ artinya $1/3$ hasil industri dapat “diekspor”, sedang $2/3$ dikonsumsi daerah yang bersangkutan.

Penggunaan LQ sangat sederhana serta dapat dipakai untuk menganalisis “ekspor-impor” (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai kelemahan, yaitu (Widodo, 2006):

1. Selera atau pola konsumsi setiap anggota masyarakat berbeda-beda, baik antara daerah maupun dalam suatu daerah.
2. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah juga berbeda-beda. Artinya, konsumsi rata-rata bahan pakaian daerah A lebih besar dari 1 (satu) tetapi daerah A “mengimpor” bahan pakaian, sedang daerah B yang memiliki indeks LQ industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat “mengeksport” bahan pakaian.
3. Bahan keperluan industri berbeda antar daerah. Sebagai contoh, daerah A memakai benang tenun dari kapas, sedang daerah B lebih banyak memakai bahan tenun sintetis. Walaupun industri pemintalan kapas daerah A mempunyai indeks LQ lebih besar dari 1 (satu), daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenun dari daerah B yang industri tekstilnya mungkin memiliki indeks LQ kurang dari 1 (satu).

5.2. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ)

Tabel 5.1 berikut menunjukkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Indramayu pada periode 2010-2017. Sektor yang menjadi *industry basic* di Kabupaten Indramayu adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1, yang berarti ketiga sektor tersebut mampu memenuhi permintaannya sendiri di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, sektor-sektor lain menjadi *industry non-basic*.



Tabel 5.1 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Indramayu, 2010-2017

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,467	1,596	1,691	1,748	1,781	1,846	1,979	1,990	1,762
Pertambangan dan Penggalian	4,599	5,101	6,195	6,716	6,746	7,005	6,731	6,883	6,247
Industri Pengolahan	1,120	1,110	1,083	1,048	1,049	1,038	1,033	1,034	1,064
Pengadaan Listrik dan Gas	0,067	0,076	0,077	0,078	0,079	0,092	0,098	0,121	0,086
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,680	0,730	0,781	0,842	0,882	0,931	0,984	1,030	0,858
Konstruksi	0,528	0,511	0,508	0,516	0,527	0,557	0,588	0,617	0,544
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,536	0,545	0,548	0,582	0,611	0,629	0,646	0,662	0,595
Transportasi dan Pergudangan	0,419	0,411	0,414	0,442	0,461	0,476	0,500	0,523	0,456
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,473	0,478	0,498	0,519	0,529	0,538	0,549	0,569	0,519
Informasi dan Komunikasi	0,189	0,181	0,182	0,184	0,180	0,184	0,194	0,202	0,187
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,366	0,377	0,391	0,386	0,397	0,412	0,421	0,449	0,400
Real Estat	0,341	0,324	0,325	0,340	0,348	0,362	0,391	0,405	0,354
Jasa Perusahaan	0,508	0,468	0,483	0,487	0,483	0,497	0,519	0,540	0,498
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,755	0,814	0,852	0,890	0,910	0,934	0,982	1,030	0,896
Jasa Pendidikan	0,609	0,580	0,609	0,635	0,632	0,653	0,695	0,721	0,642
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,520	0,502	0,503	0,516	0,506	0,516	0,538	0,559	0,520
Jasa lainnya	0,190	0,181	0,180	0,179	0,176	0,183	0,189	0,196	0,184

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

5.3. Hasil Perhitungan *Symmetric Location Quotient* (SLQ)

Symmetric Location Quotient (SLQ) pada dasarnya mempunyai interpretasi yang sama dengan perhitungan LQ biasa. Namun, hanya dibuat simetris agar nilainya antara -1 hingga 1 saja. Untuk mendapatkan nilai SLQ, digunakan rumus berikut:

$$SLQ = \frac{LQ - 1}{LQ + 1}$$

Suatu sektor menjadi *industry basic* apabila memiliki nilai SLQ yang positif. Begitu pula sebaliknya, sektor yang memiliki nilai SLQ negatif adalah *industry non-basic* di daerah yang bersangkutan.

Tabel 5.2 berikut menunjukkan hasil perhitungan SLQ Kabupaten Indramayu pada periode 2010-2017. Sektor yang menjadi *industry basic* di Kabupaten Indramayu adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta



Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1, yang berarti ketiga sektor tersebut mampu memenuhi permintaannya sendiri di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, sektor-sektor lain menjadi *industry non-basic*.

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan SLQ Kabupaten Indramayu, 2010-2017

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,189	0,230	0,257	0,272	0,281	0,297	0,329	0,331	0,273
Pertambangan dan Penggalian	0,643	0,672	0,722	0,741	0,742	0,750	0,741	0,746	0,720
Industri Pengolahan	0,056	0,052	0,040	0,023	0,024	0,018	0,016	0,017	0,031
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,875	-0,859	-0,857	-0,856	-0,853	-0,831	-0,822	-0,785	-0,842
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,191	-0,156	-0,123	-0,086	-0,063	-0,035	-0,008	0,015	-0,081
Konstruksi	-0,308	-0,323	-0,326	-0,319	-0,310	-0,285	-0,260	-0,237	-0,296
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,302	-0,295	-0,292	-0,265	-0,241	-0,228	-0,215	-0,203	-0,255
Transportasi dan Pergudangan	-0,409	-0,417	-0,414	-0,387	-0,369	-0,355	-0,334	-0,313	-0,375
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,358	-0,353	-0,335	-0,317	-0,308	-0,300	-0,291	-0,275	-0,317
Informasi dan Komunikasi	-0,682	-0,694	-0,691	-0,689	-0,694	-0,689	-0,676	-0,664	-0,685
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,464	-0,452	-0,438	-0,443	-0,431	-0,417	-0,408	-0,380	-0,429
Real Estat	-0,492	-0,510	-0,509	-0,493	-0,484	-0,468	-0,438	-0,424	-0,477
Jasa Perusahaan	-0,326	-0,362	-0,348	-0,345	-0,349	-0,336	-0,317	-0,299	-0,335
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,139	-0,102	-0,080	-0,058	-0,047	-0,034	-0,009	0,15	-0,057
Jasa Pendidikan	-0,243	-0,266	-0,243	-0,223	-0,225	-0,210	-0,180	-0,162	-0,219
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,316	-0,332	-0,331	-0,320	-0,328	-0,319	-0,300	-0,283	-0,316
Jasa lainnya	-0,681	-0,693	-0,695	-0,696	-0,700	-0,691	-0,682	-0,672	-0,689

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

5.4. Hasil Perhitungan Dynamic SLQ

Analisis *dynamic SLQ* dapat menunjukkan pola perubahan LQ antar-waktu dan menunjukkan apakah Kabupaten Indramayu semakin berkembang ke arah industri *basic* atau ke arah industri *non-basic*. Beberapa metode statistik-matematis digunakan untuk mengukur perubahan spesialisasi antar waktu, yaitu statistik deskriptif dan estimasi ekonometrik.

5.4.1. Metode Hitungan Statistik Deskriptif

Perkembangan sektoral di suatu wilayah dapat dibagi menjadi spesialisasi dan despesialisasi. Jika terjadi spesialisasi, industri-industri *basic* akan menjadi semakin memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan daerah domestik dan daerah lain, sementara industri *non-basic* semakin berfokus pada memenuhi permintaan daerah sendiri. Sebaliknya, jika terjadi despesialisasi, semua industri semakin bergerak menuju arah yang sama, baik menjadi industri *basic* atau menjadi industri *non-basic*.

Arah spesialisasi atau despesialisasi dapat dilihat dari nilai hitungan standar deviasi dan skewness atas indeks SLQ. Nilai standar deviasi mengukur besaran variasi atau dispersi suatu data dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang semakin besar menunjukkan spesialisasi (*industry basic* semakin berkembang, sementara *industry non-basic* juga semakin berkembang). Nilai skewness menunjukkan arah perkembangan spesialisasi industri, apakah berpusat pada *industry basic* atau semakin berpusat pada *industry non-basic*. Nilai skewness positif menunjukkan bahwa spesialisasi terjadi pada *industry non-basic* sementara nilai skewness negatif menunjukkan bahwa spesialisasi terjadi pada *industry basic*.

Tabel 5.3 di bawah ini menunjukkan nilai perhitungan statistik deskriptif atas indeks SLQ yang terdapat di Tabel 5.2.

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Pola Spesialisasi Sektoral di Indramayu

Statistik Deskriptif	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skewness	1,00	1,06	1,10	1,06	1,01	1,01	0,92	0,92
Kurtosis	2,12	2,03	2,17	2,14	2,01	1,98	1,73	1,71
Standar deviasi	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Nilai standar deviasi dan skewness menunjukkan bahwa antara tahun 2010 – 2017, terdapat pergerakan menuju spesialisasi. Artinya, industri-industri yang sebelumnya bersifat *basic* semakin bergerak ke arah *basic*, sementara industri-industri yang sebelumnya tergolong *non-basic* semakin bergerak ke arah *non-basic*. Nilai skewness yang positif dan menurun menunjukkan bahwa spesialisasi sektor yang selama ini terjadi di Indramayu terpusat pada industri *non-basic* dan cenderung bergerak ke arah *basic*.

5.4.2. Metode Hitungan Dinamis

Untuk melihat pola hubungan dinamis, analisis ekonometrik dilakukan dengan mengestimasi model berikut ini.

$$SLQ_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 SLQ_{it-1} + \epsilon_{it}$$

Nilai α_2 menunjukkan pergerakan pola nilai SLQ antar-waktu. Jika nilai $\alpha_1 > 1$, hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor di Kabupaten Indramayu semakin mengalami spesialisasi dan terkonsentrasi pada beberapa jenis sektor saja. Jika nilai $\alpha_1 = 1$, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pola spesialisasi pada sektor-sektor di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, jika nilai $0 < \alpha_1 < 1$, hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor di Kabupaten Indramayu semakin terdespesialisasi.

Hasil estimasi atas persamaan di atas menunjukkan

$$SLQ_{2017} = 0.0129591 + 1.006944 SLQ_{2010}$$

Nilai α_1 hasil estimasi adalah sebesar 1.006944, yang bernilai mendekati 1. Koefisien ini juga signifikan secara statistik. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2017 terdapat pergerakan menuju spesialisasi, namun pergerakan ini sangat kecil.

BAB 6

ANALISIS *SHIFT-SHARE*

6.1. Metode Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan teknik yang sangat berguna untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi (nasional) sebagai referensi atau acuan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah relatif terhadap daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.
2. Pergeseran proporsional (*propotional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk analisis *shift share* ini adalah sebagai berikut:

- Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$



- Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

- Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri:

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

- Pengaruh keunggulan kompetitif:

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

di mana:

- E_{ij} = PDRB di sektor i daerah j,
- E_{in} = PDRB di sektor i nasional,
- r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j,
- r_{in} = laju pertumbuhan sektor i nasional, dan
- r_n = laju pertumbuhan ekonomi nasional

6.2. Hasil Perhitungan Shift-Share

Tabel 6.1 berikut menunjukkan hasil perhitungan Shift-Share Kabupaten Indramayu pada periode 2010-2017. Selama periode tersebut, Kabupaten Indramayu mengalami penambahan nilai absolut sebesar 1.431,6 milyar Rupiah. Sektor ekonomi yang kompetitif (memiliki C_{ij} yang positif) antara lain:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
5. Transportasi dan Pergudangan; dan
6. Jasa Perusahaan.

Secara umum, output yang dihasilkan dari bauran industri (M_{ij}) di Kabupaten Indramayu sebagian besar berdampak positif. Namun, ada beberapa sektor yang merasakan dampak negatif, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Jasa Perusahaan



Tabel 6.1 Hasil Perhitungan *Shift-Share* Kabupaten Indramayu, 2010-2017

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Komponen			
		Rn	Rin	Rij	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		0,017	0,031	451.863,3	-320.976,5	110.874,6	241.761,5
2	Pertambangan dan Pengalihan		-0,017	0,012	476.183,6	-619.476,5	239.908,0	96.615,1
3	Industri Pengolahan		0,053	0,011	1.432.206,2	-119.680,3	-1.050.981,9	261.544,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas		0,005	0,059	1.355,0	-1.226,3	1.260,6	1.389,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,063	0,021	2.093,6	208,6	-1.554,2	748,0
6	Konstruksi		0,085	0,076	133.360,9	61.942,3	-20.188,1	175.115,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		0,059	0,059	292.128,7	5.670,0	2.551,9	300.350,7
8	Transportasi dan Pergudangan		0,081	0,083	64.100,9	25.688,2	2.066,2	91.855,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		0,072	0,069	39.649,2	9.935,0	-2.490,9	47.093,3
10	Informasi dan Komunikasi		0,145	0,122	18.202,3	27.645,0	-7.457,4	38.389,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		0,078	0,077	29.827,7	10.558,0	-520,0	39.865,7
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		0,073	0,067	12.645,1	3.336,1	-1.247,2	14.734,0
13	Real Estat		0,088	0,022	6.128,5	3.169,2	-6.926,7	2.370,9
14	Jasa Perusahaan		0,013	0,028	60.133,8	-46.531,0	15.074,1	28.676,9
15	Jasa Pendidikan		0,113	0,107	49.369,2	47.239,5	-5.430,6	91.178,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		0,103	0,082	10.912,8	8.513,7	-3.952,0	15.474,5
17	Jasa lainnya		0,097	0,070	10.954,3	7.445,6	-5.189,1	13.210,9
	PDRB TOTAL	0,058	0,058	0,027	3.091.115,1	0,0	-1.659.513,2	1.431.601,9

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu (2018).

Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu (Nij) menunjukkan nilai positif pada setiap sektor ekonomi, dengan total nilai output sebesar 3.091,1 milyar Rupiah. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Tangerang yang dibandingkan dengan tingkat provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi yang berada pada tingkat provinsi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, kecuali untuk sektor sektor berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Pengalihan; (3) Pengadaan Listrik dan Gas; (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan



Sepeda Mobil; (5) Transportasi dan Pergudangan; dan (6) Jasa Perusahaan.



BAB 7

ANALISIS ALTERNATIVE INCOME

7.1. Pentingnya *Alternative Income*

Seiring tumbuhnya perekonomian suatu negara, maka peran sektor Pertanian sebagai penggerak pertumbuhan akan semakin berkurang dan penggerak-penggerak baru akan muncul, baik di sektor ekonomi pedesaan non-pertanian, maupun di ekonomi perkotaan. Fenomena ini umum terjadi di negara-negara Asia selama beberapa dekade terakhir (Christiaensen *et al.*, 2011). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu merancang dan mempersiapkan penggerak-penggerak baru tersebut. Analisis *alternative income* yang dimaksud di dalam bab ini adalah analisis untuk mengidentifikasi potensi pendapatan sektor lain di luar sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama ini masih menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Kabupaten Indramayu.

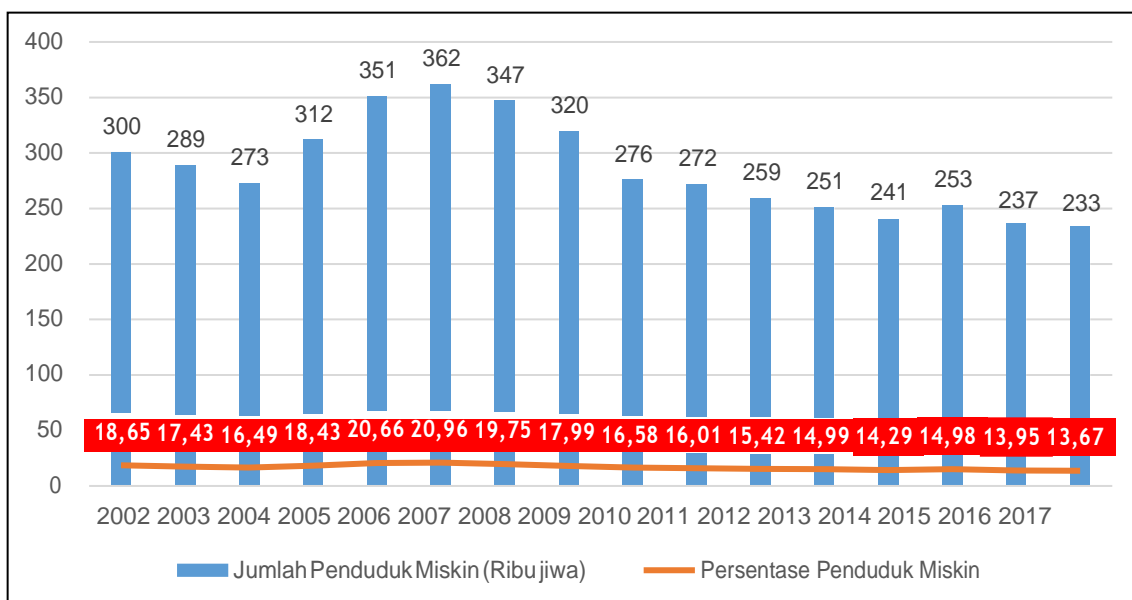
Sebagaimana terlihat pada Tabel 7.1 berikut, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama 2007-2015 mencapai 40,43 persen dari total penduduk usia 15 tahun yang bekerja di Kabupaten Indramayu. Di samping tinggi, seperti yang terlihat pada Gambar 4.1 berikut, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu dari tahun 2002 hingga 2017 belum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya, daya beli (permintaan) masyarakat Kabupaten Indramayu saat ini masih rendah sehingga pendapatan mereka harus ditingkatkan.

Tabel 7.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2015

Lapangan Usaha	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja (Ribujiwa)									Rerata	Pangsa (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	314,9	266,0	297,4	303,0	270,9	278,6	284,0	286,3	233,3	281,6	40,43
Konstruksi	34,4	23,2	36,0	28,7	35,0	34,2	26,6	34,4	56,6	34,3	4,93
Listrik dan Gas	5,2	5,2	3,1	1,8	-	0,8	0,7	2,2	3,7	2,8	0,41
Jasa Keuangan	3,5	3,6	2,9	6,1	12,7	11,8	6,1	10,7	13,1	7,8	1,12
Industri	45,1	29,9	59,8	50,7	45,3	43,2	38,4	28,1	40,3	42,3	6,08

Lapangan Usaha	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja (Ribujiwa)										Rerata	Pangsa (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Pertambangan dan Penggalian	1,8	1,6	3,6	6,2	-	4,8	1,8	7,5	2,8	3,8	0,54	
Jasa Kemasyarakatan	72,1	45,1	83,7	90,6	91,6	104,1	135,5	103,6	94,0	91,1	13,09	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	165,5	139,8	163,3	159,0	206,9	200,7	192,8	194,1	198,8	180,1	25,86	
Transportasi dan telekomunikasi	58,6	58,5	60,5	32,4	40,3	36,6	31,9	38,2	34,5	43,5	6,24	
Jumlah	701,0	661,2	710,4	678,5	702,7	714,7	717,7	705,2	677,2	696,5		

Sumber: Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018).



Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu, 2002-2017

Sumber: BPS (2018), Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018).

7.2. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang menjadi sektor prima, potensial, berkembang dan terbelakang di suatu daerah. Sektor prima adalah sektor yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar. Sektor potensial adalah sektor yang tumbuh lambat namun berkontribusi besar. Sektor berkembang adalah sektor yang tumbuh cepat namun berkontribusi kecil. Sementara itu, sektor terbelakang adalah sektor yang tumbuh lambat dan berkontribusi kecil.

Pertumbuhan dan kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian daerah dalam analisis ini diukur dengan data PDRB atas dasar harga konstan. Gambar 7.2 berikut menunjukkan hasil perhitungan analisis Tipologi Klassen Kabupaten Indramayu dari tahun 2010 hingga 2017.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian termasuk sektor prima di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, yang termasuk sektor potensial antara lain: (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Transportasi dan Pergudangan; serta (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor Industri Pengolahan serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menjadi sektor berkembang di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian, sektor yang terbelakang di Kabupaten Indramayu masih cukup banyak sehingga harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indramayu agar dalam jangka pendek menjadi sektor berkembang dan dalam jangka panjang menjadi sektor potensial.

	TUMBUH CEPAT (RIJ >= RIN)	TUMBUH LAMBAT (Rij < Rin)	
Kontribusi Besar (Kij >= Kin)	1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian Prima	1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Potensial	Kontribusi Besar (Kij >= Kin)
Kontribusi Kecil (Kij < Kin)	1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Berkembang	1. Konstruksi 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estat 6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Pendidikan 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9. Jasa Lainnya Terbelakang	Kontribusi Kecil (Kij < Kin)
	TUMBUH CEPAT (RIJ >= RIN)	TUMBUH LAMBAT (Rij < Rin)	

Gambar 7.2 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Indramayu, 2010-2017
 Sumber: BPS (2018).



7.3. Pendapatan per Pekerja

Pendapatan per pekerja per tahun di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha dapat diperoleh dari nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dibagi dengan jumlah pekerja menurut lapangan usaha seperti pada Tabel 7.1 di atas. Hasil perhitungan pendapatan per pekerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut. Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor dengan rata-rata pendapatan per pekerja tertinggi di Kabupaten Indramayu selama 2007-2013 (1,84 milyar Rupiah per jiwa per tahun). Namun, sektor ini tidak banyak menyerap tenaga kerja di Indramayu (lihat Tabel 7.1) karena sektor ini membutuhkan pekerja dengan kualifikasi keterampilan yang sangat khusus. Berbeda dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki rata-rata pendapatan per pekerja tidak terlalu tinggi (10 juta Rupiah per jiwa per tahun) namun menyerap banyak tenaga kerja. Sementara itu, sektor Jasa Kemasyarakatan menjadi sektor dengan rata-rata pendapatan per pekerja terendah, yaitu hanya sebesar 8,11 juta Rupiah per jiwa per tahun.

Tabel 7.2 Pendapatan per Pekerja per Tahun di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2013 (Rp Ribu/Jiwa/Tahun)

Lapangan Usaha	Pendapatan per Pekerja (Rp Ribu/Jiwa/Tahun)							Rerata
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.320	9.257	9.493	9.599	11.079	11.015	11.291	10.008
Konstruksi	5.355	8.831	5.693	7.349	7.284	11.172	15.276	8.709
Listrik dan Gas	9.838	10.357	18.372	34.929	-	92.412	103.714	44.937
Jasa Keuangan	50.972	51.687	66.316	33.379	16.592	19.899	43.060	40.272
Industri	56.221	101.742	45.542	55.581	63.519	53.446	60.450	62.357
Pertambangan dan Penggalian	2.377.520	2.722.870	1.182.462	684.860	-	1.094.795	2.973.252	1.839.293
Jasa Kemasyarakatan	8.352	13.842	7.687	7.279	7.414	6.666	5.535	8.111
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.656	16.162	14.745	17.123	14.488	15.919	17.749	15.549
Transportasi dan telekomunikasi	7.560	7.943	8.075	15.553	13.425	16.259	21.373	12.884
Jumlah	9.241	9.958	10.084	11.241	21.431	22.128	22.770	15.265

Sumber: Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018), diolah.



Selama periode 2007-2013 sektor Listrik dan Gas menjadi sektor dengan pertumbuhan pendapatan per pekerja tertinggi (46,25 persen), lalu diikuti oleh sektor Konstruksi (24,61 persen) serta Transportasi dan Telekomunikasi (23,06 persen). Dari Tabel 7.3 berikut juga dapat diketahui bahwa sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami pertumbuhan yang negatif selama periode tersebut (-1,54 persen). Artinya, pendapatan per pekerja per tahun di sektor ini justru berkurang rata-rata sebesar 1,54 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan per pekerja di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan rata-rata tumbuh sekitar 5,38 persen setiap tahunnya. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indramayu, mengingat pekerja di sektor ini paling banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lain dan pendapatan mereka relatif rendah dan tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

Tabel 7.3 Pertumbuhan Pendapatan per Pekerja di Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha, 2007-2013 (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Pendapatan per Pekerja (%)						Rerata
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,25	2,55	1,12	15,41	-0,58	2,51	5,38
Konstruksi	64,89	-35,53	29,09	-0,88	53,36	36,74	24,61
Listrik dan Gas	5,28	77,38	90,13	-	-	12,23	46,25
Jasa Keuangan	1,40	28,30	-49,67	-50,29	19,93	116,39	11,01
Industri	80,97	-55,24	22,04	14,28	-15,86	13,11	9,88
Pertambangan dan Penggalian	14,53	-56,57	-42,08	-	-	171,58	21,86
Jasa Kemasyarakatan	65,73	-44,47	-5,30	1,86	-10,09	-16,96	-1,54
Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,70	-8,77	16,13	-15,39	9,87	11,50	6,84
Transportasi dan telekomunikasi	5,07	1,66	92,60	-13,68	21,11	31,45	23,04
Jumlah	7,76	1,26	11,47	90,64	3,25	2,90	19,55

Sumber: Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018), diolah.

7.4. Elastisitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

Nilai elastisitas tenaga kerja terhadap PDRB dapat diperoleh dari pembagian antara pertumbuhan PDRB Kabupaten Indramayu atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan jumlah pekerja menurut lapangan kerja. Hasil perhitungan

elastisitas untuk periode 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 7.4 berikut. Ada empat sektor yang memiliki nilai elastisitas yang positif, yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Industri; (3) Pertambangan dan Penggalian; serta (4) Jasa Kemasyarakatan. Berikut adalah interpretasi nilai elastisitas dari keempat sektor tersebut.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,01): Jika jumlah pekerja di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan naik sebesar 1 persen, maka PDRB di sektor ini akan bertambah sebanyak 1,01 persen, *ceteris paribus*.
2. Industri (0,52): Jika jumlah pekerja di sektor Industri naik sebesar 1 persen, maka PDRB di sektor ini akan bertambah sebanyak 0,52 persen, *ceteris paribus*.
3. Pertambangan dan Penggalian (0,01): Jika jumlah pekerja di sektor Pertambangan dan Penggalian naik sebesar 1 persen, maka PDRB di sektor ini akan bertambah sebanyak 0,01 persen, *ceteris paribus*.
4. Jasa Kemasyarakatan (0,59): Jika jumlah pekerja di sektor Jasa Kemasyarakatan naik sebesar 1 persen, maka PDRB di sektor ini akan bertambah sebanyak 0,59 persen, *ceteris paribus*.

Tabel 7.4 Elastisitas Tenaga Kerja terhadap PDRB, 2007-2013

Lapangan Usaha	Elastisitas						Rerata
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,39	1,24	1,61	-0,30	0,79	2,31	1,01
Konstruksi	-0,35	0,00	-0,13	0,95	-22,37	-0,28	-3,70
Listrik dan Gas	-10,83	-0,21	-0,16	-	-	-1,22	-3,11
Jasa Keuangan	1,42	-0,29	0,03	0,04	-1,80	-0,22	-0,14
Industri	-0,60	-0,11	-0,23	-0,21	4,27	-0,03	0,52
Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,00	-	-	0,01	0,01
Jasa Kemasyarakatan	-0,10	0,03	0,31	2,88	0,16	0,27	0,59
Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,51	0,39	-5,01	0,34	-2,17	-1,82	-1,46
Transportasi dan telekomunikasi	-155,20	1,52	-0,07	0,30	-1,08	-1,14	25,94

Sumber: Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018), diolah.

Dari tabel di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menambah



jumlah pekerja di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka pertumbuhan PDRB yang dihasilkan dari sektor ini paling tinggi daripada sektor-sektor lain.

7.5. Respon Masyarakat Tani

Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan terhadap masyarakat tani (Gapoktan, Poktan, Penyuluh) dapat diketahui bahwa sejauh ini *alternative income* mereka ketika menunggu musim panen adalah menjadi buruh bangunan, sopir atau pemilik warung. Sebagian petani padi bahkan memiliki pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas, seperti peternak ayam dan kambing. Menurut mereka, pendapatan dari bertani masih lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti yang telah disebutkan di atas. Mayoritas responden masih keberatan jika diminta beralih pekerjaan dari sektor pertanian karena keterampilan mereka masih terbatas (hanya bisa di bidang pertanian dalam arti luas) sementara pasar tenaga kerja (terutama di sektor industri dan jasa) saat ini menuntut keterampilan lebih.

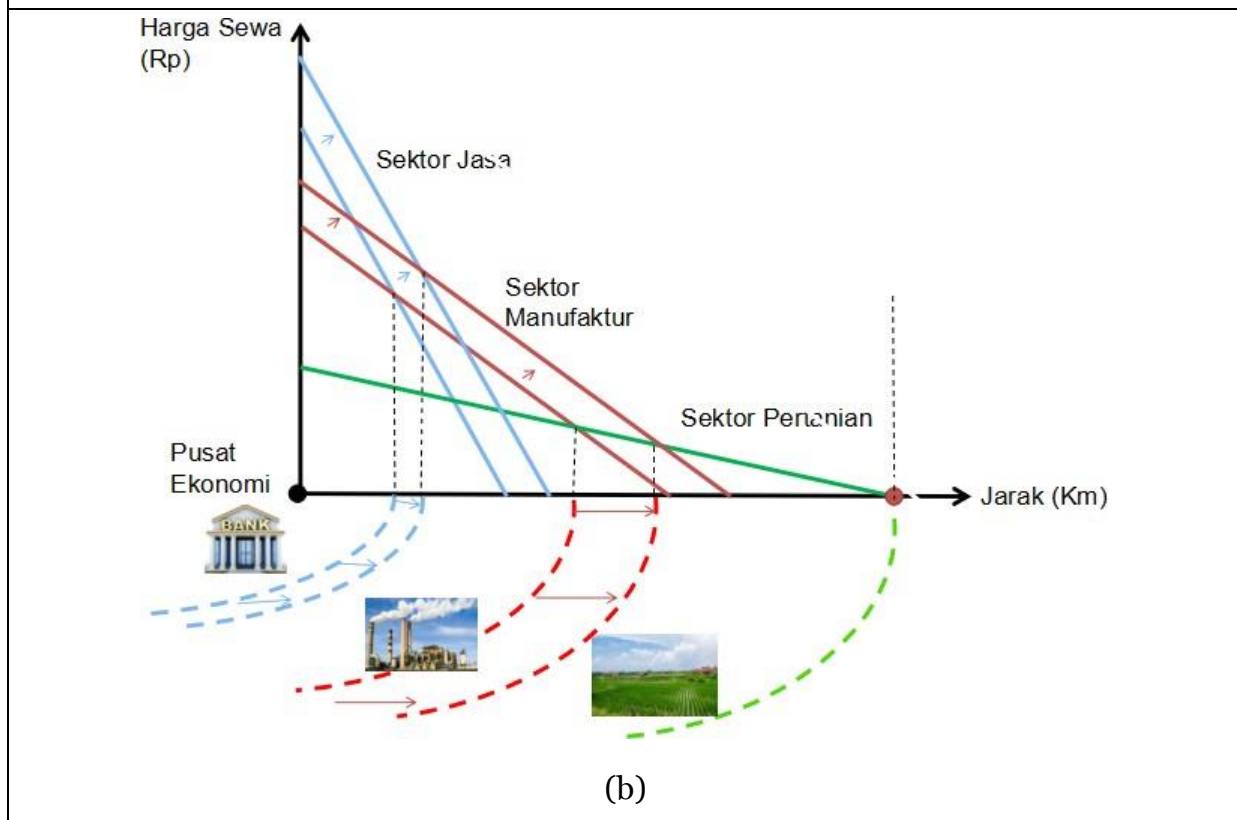
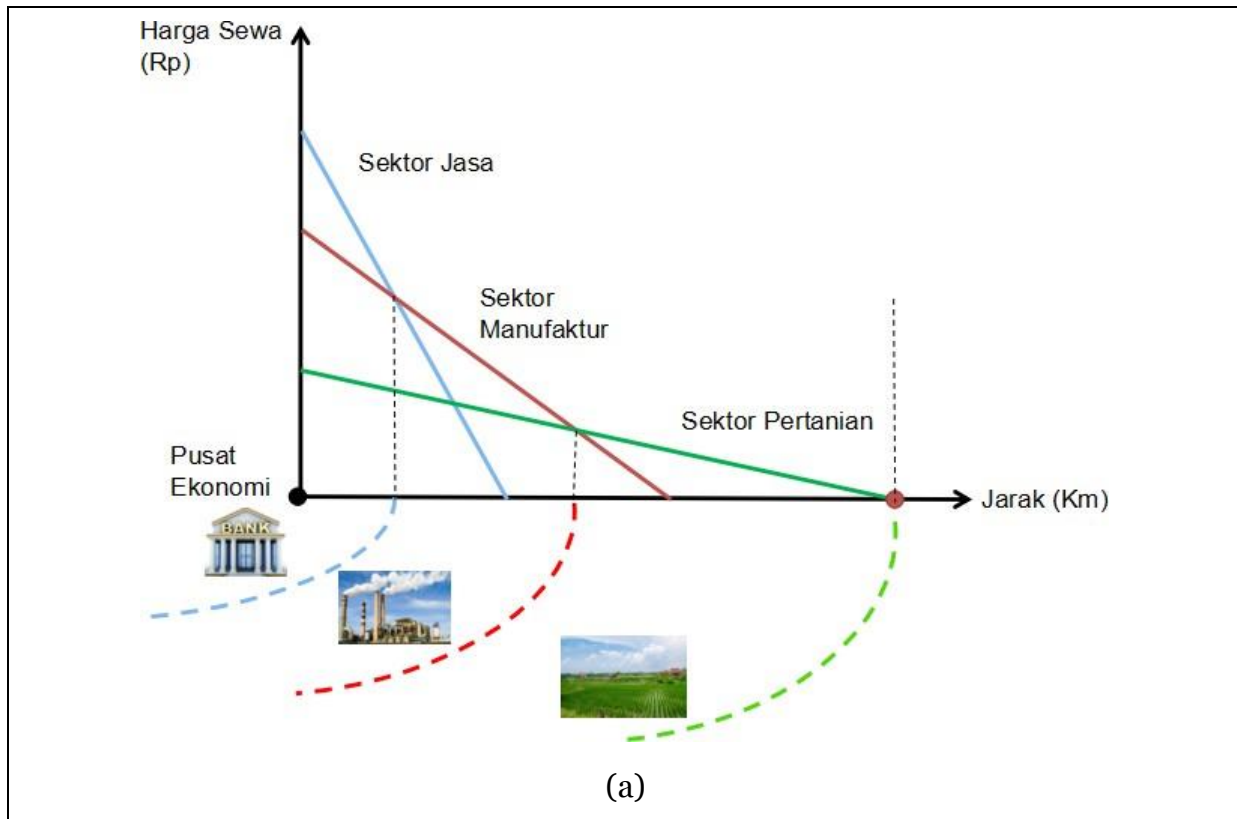
BAB 8

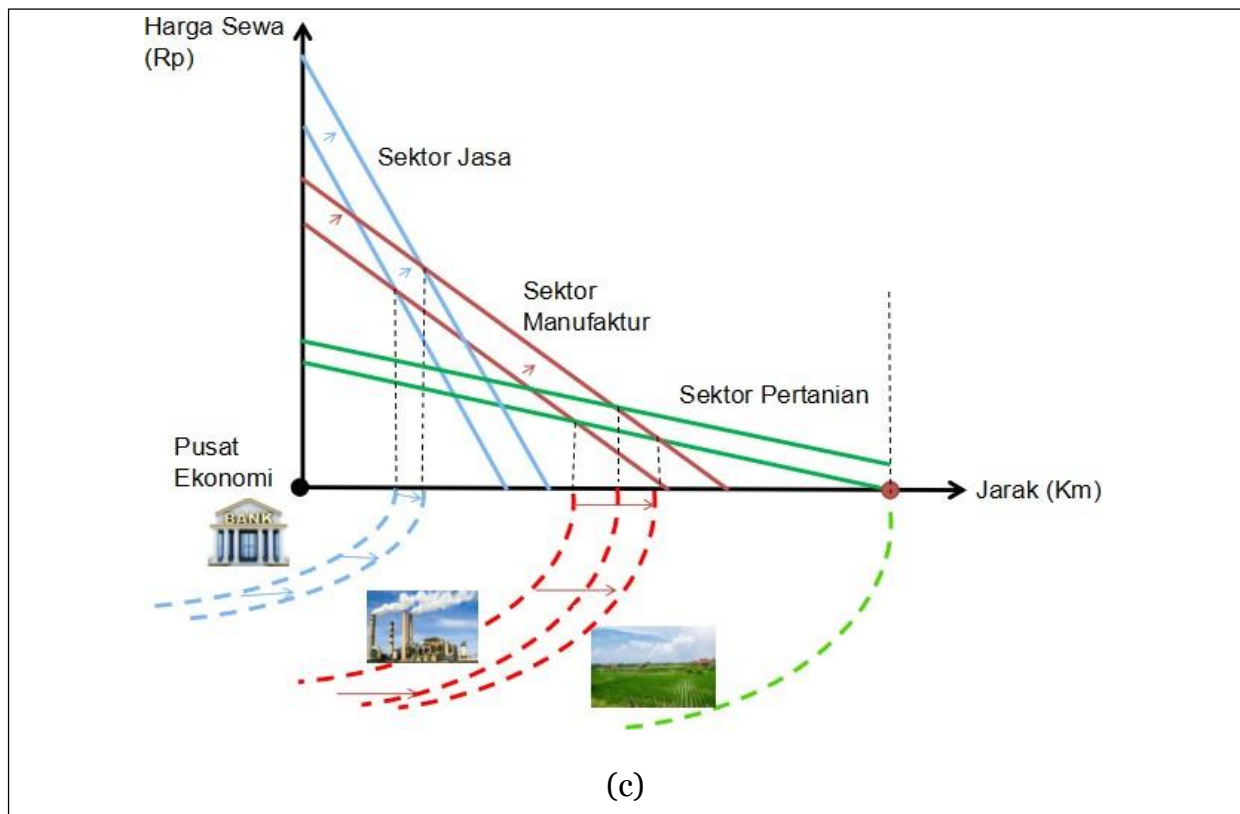
ANALISIS KEBERLANJUTAN SEKTOR PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

8.1. Pengentasan Kemiskinan di Sektor Pertanian

Dengan tingkat modal yang rendah, output akan lebih efisien diproduksi dengan metode pertanian. Akumulasi modal manusia membuat metode pertanian semakin ditinggalkan dan mulai diadopsinya metode industri untuk memproduksi sebuah barang final. Pergeseran ini terjadi ketika produktivitas rata-rata dengan metode industri lebih tinggi daripada produktivitas rata-rata dengan metode pertanian. Petani di suatu daerah dengan luas lahan per anggota keluarga lebih tinggi akan lebih lambat dalam mengadopsi metode industri dibandingkan dengan petani di suatu daerah dengan luas lahan per anggota yang lebih rendah (Tamura, 2002). Di samping itu, kepemilikan lahan pertanian yang semakin luas juga akan mengurangi tingkat kemiskinan di sektor Pertanian. Dari kunjungan lapangan yang telah dilakukan, petani kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada petani yang memiliki lahan pertanian.

Fenomena semakin berkurangnya luas lahan pertanian dan meningkatnya jumlah petani kontrak/sewa dapat dijelaskan dengan teori lokasi (lihat Gambar 8.1). Sektor Jasa cenderung berlokasi paling dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, lalu diikuti oleh sektor Industri Manufaktur dan sektor Pertanian. Seiring tumbuhnya perekonomian, sektor Jasa dan Industri Manufaktur membutuhkan lahan yang semakin banyak, sehingga luas lahan Pertanian semakin berkurang dan harga sewa (tanah, bangunan dll.) menjadi naik. Kenaikan harga sewa juga terjadi di sektor Pertanian. Akibatnya, semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan dan cenderung menjadi petani kontrak/sewa.





Gambar 8.1 Teori Lokasi Sektor Jasa, Manufaktur dan Pertanian

Di samping kepemilikan lahan per petani, distribusi kepemilikan lahan pertanian juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di sektor pertanian. Bourguignon dan Morrisson (1998) menemukan bahwa semakin besar pangsa lahan yang dimiliki oleh petani kecil dan sedang, maka semakin rendah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan oleh karenanya dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan semakin tinggi. Di China, yang dicirikan dengan distribusi lahan yang relatif merata, pertumbuhan di sektor Pertanian akan mengurangi tingkat kemiskinan empat kali lebih cepat daripada pertumbuhan di sektor industri dan jasa (Ravaillon dan Chen, 2007). Sementara itu, di India yang distribusinya tidak merata dan kepemilikan lahan adalah suatu hal yang langka bagi petani kecil, pertumbuhan di sektor Pertanian akan sama cepatnya dengan pertumbuhan di sektor jasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pertumbuhan di sektor industri tidak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan (Ravaillon dan Datt, 1996).



Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah harus didorong agar tingkat kemiskinan dapat berkurang. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan konsep elastisitas. Tabel 8.1 berikut menunjukkan hasil perhitungan elastisitas tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu dari tahun 2010 hingga 2017. Nilai elastisitas menunjukkan sebesar -0,54 yang berarti bahwa jika tingkat kemiskinan turun sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu akan naik sebesar 0,54 persen, *ceteris paribus*.

Tabel 8.1 Elastisitas Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu, 2010-2017

Tahun	PDRB (Rp Juta)	Jumlah Penduduk Miskin	Ln PDRB	Ln Jumlah Penduduk Miskin	Elastisitas
2010	47.859.833,35				
2011	49.804.915,52	16,01	4,06	-3,44	-1,18
2012	51.389.039,61	15,42	3,18	-3,69	-0,86
2013	52.858.950,97	14,99	2,86	-2,79	-1,03
2014	55.464.114,36	14,29	4,93	-4,67	-1,06
2015	56.663.300,27	14,98	2,16	4,83	0,45
2016	56.706.182,92	13,95	0,08	-6,88	-0,01
2017	57.527.241,14	13,67	1,45	-2,01	-0,72
Rata-rata					-0,54

Sumber: BPS (2018), Indonesia Database for Policy and Economic Research (2018).

Di dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai sebesar 9,97 persen dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 4 sampai 5,5 persen. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di kabupaten ini baru mencapai sebesar 13,67 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,45 persen. Artinya, untuk mencapai target tingkat kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen dari nilai sekarang (atau sekitar 3,45 persen), *ceteris paribus*. Atau, jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen yang ingin dicapai, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 4,72 persen atau menjadi 8,95 persen, *ceteris paribus*. Angka tersebut lebih rendah daripada tingkat kemiskinan nasional pada bulan Maret 2018 (9,82 persen). Atau, jika Pemerintah Kabupaten Indramayu ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen (meskipun agak sulit jika tidak disertai usaha keras), maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 7,5 persen atau menjadi 6,17



persen, *ceteris paribus*. Tingkat kemiskinan sebesar atau 8,95 atau 6,17 persen adalah sebuah pencapaian yang luar biasa jika Pemerintah Kabupaten Indramayu mampu merealisasikannya, mengingat di tingkat nasional saja pencapaian terbaik baru 9,82 persen (Maret 2018).

8.2. Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis di dalam sub-bab ini berisi permasalahan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, terutama dalam urusan Pertanian, urusan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8.2 Analisis Isu Strategis Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Urusan	Isu Strategis
Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;2. Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum optimal;3. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka agribisnis;4. Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;5. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih cukup tinggi;6. Serangan hama dan penyakit tanaman masih cukup tinggi;7. Kemampuan dalam pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;8. Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;9. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal; dan10. Akses permodalan bagi petani belum merata.
Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang ada;2. Belum optimalnya rehabilitasi, konservasi dan perlindungan sumber daya hutan;3. Belum optimalnya produksi komoditas perkebunan;4. Tingginya kerusakan hutan mangrove akibat pencemaran;5. Masih kurangnya tenaga teknis yang menguasai teknik-teknik pembibitan tanaman kehutanan dan sarana prasarana kebun persemaian yang belum memadai;6. Pembuatan bibit tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan;7. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove belum optimal; dan8. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal.



Urusan	Isu Strategis
Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Produktivitas hasil kelautan maupun perikanan masih belum maksimal;2. PAD hasil perikanan tangkap belum optimal;3. Komoditas ekspor hasil perikanan masih rendah;4. Pelestarian ekosistem perairan umum masih belum optimal;5. Fungsi kelembagaan pelaku usaha perikanan dan kelautan belum optimal; dan6. Akses permodalan pelaku usaha perikanan masih kurang.

Secara umum beberapa isu strategis yang berkaitan dengan urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan berhasil dikonfirmasi ketika kunjungan lapangan. Berikut adalah rinciannya.

1. Konektivitas antar kecamatan masih belum baik. Sarana jalan dan penerangan jalan masih kurang memadai sehingga aktivitas ekonomi masyarakat masih terbatas di malam hari. Selain itu, pengangkutan dan pemasaran produk pertanian (dalam arti luas) menjadi kurang lancar dengan keadaan jalan yang kurang baik. Masyarakat tani juga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencari bahan baku dengan keadaan jalan yang belum baik seperti itu. Padahal, apabila tersedia jalan dan lampu penerangan jalan yang memadai, kegiatan pengangkutan dan pemasaran produk pertanian menjadi lebih baik. Di samping itu, waktu yang dibutuhkan untuk mencari bahan baku pertanian juga menjadi semakin sedikit.
2. Fungsi penyuluh pertanian saat ini belum optimal karena harus menangani urusan administrasi dan pelaporan yang rumit. Ditambah konektivitas antar kecamatan yang masih belum baik, sistem pelaporan secara tradisional yang harus dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kepada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu membuat waktu mereka untuk melakukan penyuluhan dan melayani petani dan Poktan menjadi berkurang.
3. Selama menunggu masa panen, kurang lebih tiga bulan, para petani belum banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang signifikan. Hasil kunjungan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak mau beralih pekerjaan di luar sektor pertanian. Selain itu, belum banyak usaha yang



mampu menyerap produk pertanian dari Kabupaten Indramayu untuk diolah menjadi produk yang berdaya saing.

4. Penggunaan beberapa teknologi yang terbukti sukses di luar negeri, seperti transplanter yang sukses di Jepang dan Thailand, ternyata tidak cocok diterapkan di Kabupaten Indramayu. Perbedaan struktur tanah menjadi faktor penghambat utama teknologi tersebut tidak cocok digunakan. Selain itu, masalah hama wereng selama ini masih belum bisa diatasi oleh para petani di Kabupaten Indramayu. Penggunaan pestisida dan pupuk buatan yang berlebihan justru berdampak pada menurunnya produksi padi.
5. Kerjasama antar-Poktan dan antar-Gapoktan dalam memasarkan produk masih kurang. Hal ini pada akhirnya menyebabkan posisi tawar Poktan dan Gapoktan menjadi lemah ketika berhadapan dengan pembeli yang mempunyai permintaan yang besar seperti Jakarta. Pembeli dari Jakarta bisa menekan harga produk Pertanian serendah mungkin ketika produk yang ditawarkan Poktan atau Gapoktan jumlahnya relatif kecil. Di samping itu, kurangnya kerjasama tersebut membuat Poktan dan Gapoktan tidak mengetahui berapa jumlah produksi dan ketersediaan produk pertanian secara keseluruhan.
6. Para petani yang mengakses KUR dari perbankan dan asuransi tani cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan dengan petani yang tidak mengakses KUR dan/atau asuransi tani. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah Poktan dan Gapoktan hanya menjadi perantara bagi petani dan Perbankan saja. Artinya, Poktan dan Gapoktan hanya mendapatkan manfaat tidak langsung (*indirect benefit*). Di samping itu, selama ini baru ada KUR untuk penanaman.
7. Mayoritas petani berusia 40 tahun atau lebih. Generasi berumur 40 tahun ke bawah sangat sedikit yang mau menjadi petani. Di samping itu, tingkat pendidikan petani juga masih rendah.

8.3. Strategi Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Indramayu

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor prima di Kabupaten Indramayu. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun dari segi pendapatan per pekerja



masih lebih rendah daripada sektor-sektor lain. Meskipun demikian, jika penyerapan tenaga kerja di sektor ini dapat ditingkatkan, maka akan menghasilkan pertumbuhan PDRB paling tinggi daripada sektor-sektor lain. Masyarakat tani di Kabupaten Indramayu juga masih keberatan jika diminta beralih pekerjaan dari sektor pertanian.

Di samping itu, agar target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 tercapai, maka permasalahan dan isu strategis yang dihadapi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan harus segera diatasi oleh *stakeholders*. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu:

1. **Meningkatkan konektivitas antar kecamatan.** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu perlu segera berkoordinasi dengan instansi vertikal di tingkat provinsi dan pusat terkait penyediaan infrastruktur tersebut. Apalagi ditambah dengan keberadaan Tol Cipali yang melintasi Kabupaten Indramayu dan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, tersedianya jalan dan penerangan jalan yang memadai di Kabupaten Indramayu mutlak diperlukan untuk mendukung dua infrastruktur strategis tersebut. Melihat pentingnya dua infrastruktur strategis tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu perlu melakukan penelitian mengenai potensi dampak infrastruktur tersebut dan memasukkannya dalam analisis isu strategis RPJMD berikutnya (Tahun 2021-2026).
2. **Mengoptimalkan fungsi penyuluh pertanian melalui sistem pelaporan dan monitoring berbasis online.** Dinas Pertanian perlu mendesain sistem pelaporan dan monitoring yang lebih praktis, seperti pelaporan berbasis online, sehingga fungsi penyuluh pertanian bisa lebih optimal.
3. **Menumbuhkan industri yang mampu menyerap produk Pertanian dalam arti luas.** Di sektor Industri Pengolahan, yang dapat didorong oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah industri pengolahan makanan seperti: (1) bubuk cabai; (2) dodol mangga; (3) selai buah; (4) sirup buah; (5) nugget ayam; dan (6) bakso ikan. Dampak yang dirasakan oleh Kabupaten Indramayu akan semakin besar jika UMKM lokal diberikan kesempatan untuk mengembangkan produk-produk



tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu mendorong tumbuhkembangnya UMKM dan industri yang mampu menyerap produk pertanian untuk diolah menjadi produk yang memiliki daya saing. Pengembangan produk yang berdaya saing nantinya juga akan menambah keragaman pangan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga perlu menjamin (bisa dengan Peraturan Daerah) agar produk-produk Pertanian dan olahannya digunakan oleh hotel dan restoran di Kabupaten Indramayu.

4. **Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi Pertanian (dalam arti luas) tepat guna.** Penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian serta mengurangi efek hama harus senantiasa dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu. Bahkan, kalau perlu dengan melibatkan Perguruan Tinggi dalam negeri yang kompeten dalam pengembangan teknologi pertanian. Perkembangan dari kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut harus senantiasa dikomunikasikan dengan BPP agar informasi tersebut bisa sampai ke petani dan petani mampu menerapkan teknologi tersebut.
5. **Meningkatkan kerjasama antar Poktan dan Gapoktan dalam memasarkan Produk serta mengembangkan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.** Ketika para Poktan dan Gapoktan bekerjasama dalam melakukan pemasaran, diharapkan posisi tawar mereka menjadi lebih baik ketika berhadapan dengan pembeli-pembeli dari Jakarta atau daerah lainnya. Selain itu, ketika para Poktan dan Gapoktan bekerjasama, mereka juga bisa mengetahui berapa produksi Pertanian secara keseluruhan. Untuk mendukung itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu mengembangkan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan agar fluktuasi harga pangan akibat permainan harga oleh pembeli skala besar bisa terkendali.



6. **Mendorong akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi tani.** Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu harus senantiasa meningkatkan kerjasama (fasilitasi) dengan Perbankan untuk mendorong akses KUR kepada petani. KUR untuk penjualan belum ada sehingga ke depan Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu juga perlu merancang skema kerjasama seperti itu dengan Perbankan untuk mendorong penjualan produk Pertanian.
7. **Meningkatkan regenerasi petani.** Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang Pertanian dan Teknologi Pertanian dan menekankan dalam kontrak beasiswa bahwa para lulusan harus mau menjadi petani atau terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian di Kabupaten Indramayu.

BAB 9

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1. Kesimpulan

Kajian indikator kinerja ekonomi daerah Kabupaten Indramayu ini berhasil menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari analisis Kontribusi Sektoral dapat diketahui bahwa:
 - a) Kasus Kabupaten Indramayu termasuk anomali, karena di saat sektor industri pengolahan dan pertanian masih dominan, sektor-sektor jasa juga menggeliat. Kasus ini berbeda dengan fenomena umum di mana suatu perekonomian bertransformasi dari pertanian ke industri lalu ke jasa.
 - b) Inflasi rata-rata sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Transportasi dan Pergudangan paling tinggi daripada sektor-sektor lain.
 - c) Indeks Ketimpangan Sektoral selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, yang berarti telah terjadi diversifikasi aktivitas ekonomi di Kabupaten Indramayu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu tidak didasari oleh ketimpangan sektoral.
 - d) Meskipun kontribusinya terus menurun dan pernah menjadi penyumbang deflasi terbesar, namun sektor Pertambangan dan Penggalian masih paling menguntungkan dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Indramayu.
2. Dari analisis *Location Quotient* (LQ) dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sektor perekonomian yang termasuk *industry basic*, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan. Sementara itu, sektor (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Konstruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Transportasi dan Pergudangan; (6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (7) Informasi dan Komunikasi; (8) Jasa Keuangan dan Asuransi; (9) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan



- Sosial Wajib; (10) Real Estat; (11) Jasa Perusahaan; (12) Jasa Pendidikan; (13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta (14) Jasa Lainnya adalah *industry non-basic*. Hasil analisis antar-waktu menemukan adanya pergerakan menuju despesialisasi (sektor *basic* tidak berfokus pada pemenuhan kebutuhan luar daerah sementara sektor *non-basic* tidak berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik).
3. Dari analisis *Shift-Share* dapat diketahui bahwa:
 - a) Kabupaten Indramayu mengalami penambahan nilai absolut sebesar 1.431,6 milyar Rupiah.
 - b) Sektor ekonomi yang kompetitif antara lain: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Pengalihan; (3) Pengadaan Listrik dan Gas; (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Transportasi dan Pergudangan; dan (8) Jasa Perusahaan.
 - c) Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu menunjukkan nilai positif pada setiap sektor ekonomi, dengan total nilai output sebesar 3.091,1 milyar Rupiah.
 4. Dari analisis *Alternative Income* dapat diketahui bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor prima di Kabupaten Indramayu. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun dari segi pendapatan per pekerja masih lebih rendah daripada sektor-sektor lain. Meskipun demikian, jika penyerapan tenaga kerja di sektor ini dapat ditingkatkan, maka akan menghasilkan pertumbuhan PDRB paling tinggi daripada sektor-sektor lain. Masyarakat tani di Kabupaten Indramayu juga masih keberatan jika diminta beralih pekerjaan dari sektor pertanian.
 5. Dari analisis Keberlanjutan Sektor Pertanian dalam Mendukung Pembangunan Daerah dapat diketahui bahwa ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan keberlanjutan sektor Pertanian, yaitu:
 - a) Meningkatkan konektivitas antar kecamatan.
 - b) Mengoptimalkan fungsi penyuluh pertanian melalui sistem pelaporan dan monitoring berbasis online.
 - c) Menumbuhkan industri yang mampu menyerap produk Pertanian dalam arti



luas.

- d) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian (dalam arti luas) tepat guna.
- e) Meningkatkan kerjasama antar Poktan dan Gapoktan dalam memasarkan produk serta mengembangkan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- f) Mendorong askes Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi tani.
- g) Meningkatkan regenerasi petani.

9.2. Rekomendasi

Dari hasil kajian indikator kinerja ekonomi daerah Kabupaten Indramayu ini dapat dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut. Rekomendasi-rekomendasi ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan sektor Pertanian di Kabupaten Indramayu dan memastikan agar sektor-sektor yang selama ini menjadi *industry basic* di Kabupaten Indramayu tetap menjadi *industry basic* di masa yang akan datang.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu perlu segera berkoordinasi dengan instansi vertikal di tingkat provinsi dan pusat terkait penyediaan infrastruktur jalan dan penerangan jalan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu perlu melakukan penelitian mengenai potensi dampak keberadaan Tol Cipali dan Bandara Kertajati dan memasukkannya dalam analisis isu strategis RPJMD berikutnya (Tahun 2021-2026).
3. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu perlu mendesain sistem monitoring dan evaluasi yang lebih praktis, seperti pelaporan berbasis online, sehingga fungsi penyuluh pertanian bisa lebih optimal.
4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu mengembangkan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan agar fluktuasi harga pangan akibat permainan harga oleh pembeli skala besar bisa terkendali.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan serta Dinas



Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu mendorong tumbuh kembangnya UMKM dan industri yang mampu menyerap produk pertanian untuk diolah menjadi produk yang memiliki daya saing. Pengembangan produk yang berdaya saing nantinya juga akan menambah keragaman pangan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu harus senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi tepat guna yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian serta mengurangi efek hama. Bahkan, kalau perlu dengan melibatkan Perguruan Tinggi dalam negeri yang kompeten dalam pengembangan teknologi pertanian.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu harus senantiasa meningkatkan kerjasama (fasilitasi) dengan Perbankan untuk mendorong akses KUR kepada petani. KUR untuk penjualan belum ada sehingga ke depan Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu juga perlu merancang skema kerjasama seperti itu dengan Perbankan untuk mendorong penjualan produk Pertanian.
8. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang Pertanian dan Teknologi Pertanian dan menekankan dalam kontrak beasiswa bahwa para lulusan harus mau menjadi petani atau terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian di Kabupaten Indramayu.
9. Untuk mengimplementasikan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu memerlukan dokumen perencanaan yang berisi rencana aksi terkait pembangunan ekonomi daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Bhattacharyya, S., dan B. P. Resosudarmo. (2015). "Growth, Growth Accelerations, and the Poor: Lessons from Indonesia". *World Development*, Vol. 66: 154-165.
- Bourguignon, F., dan C. Morrisson. (1998). "Inequality and development: the role of dualism." *Journal of Development Economics*, 57:233-257.
- BPS. (2017). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2017*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.
- BPS. (2018). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2018*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.
- BPS. (2017a). *Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2012-2017*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2017b). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2018a). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2018b). *Analisis Indikator Logistik Pangan (Beras) Provinsi Jawa Barat 2017*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS Kabupaten Indramayu. (2018). <http://indramayukab.bps.go.id>
- Christiaensen, L., L. Demery, dan J. Kuhl. (2011). "The (evolving) role of agriculture in poverty reduction - An empirical perspective." *Journal of Development Economics*, 96: 239-254.
- Indonesia Database for Policy and Economic Research. (2018). <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1266>
- Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics, Sixth Edition*. South-Western Cengage Learning.
- Ravaillon, M., dan G. Datt. (1996). "How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth?" *World Bank Economic Review*, 10(1): 1-25.
- Ravaillon, M., dan S. Chen. (2007). "China's (uneven) progress against poverty." *Journal of Development Economics*, 82(1): 1-42.
- Sumarto, S., dan A. Suryahadi. (2007). Indonesia country case study. In F. Bresciani and A. Valdes (Eds.) *Beyond food production: The role of agriculture in poverty reduction*. Cheltenham: Food and Agriculture Organization of the United Nations and Edward Elgar.
- Tamura, R. (2002). "Human capital and the switch from agriculture to industry". *Journal of Economic Dynamics and Control*, 27: 207-242.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



LAMPIRAN



Rekapitulasi Hasil Kunjungan Lapangan pada 8 - 10 Agustus 2018

No	Perihal	Kroya	Pasekan	Sukagumiwang
1	Nama	Bp Rasminta	Bp Abdul Somad didampingi oleh Pak Airul dan Pak Rahmat (BPP Pasekan)	Pak Main dan Pak Bambang (BPP)
2	Kontak	085314418657	081901232664	087727554650
3	Kelompok Tani	Sri Tani Muncul	Tani Jaya (2008)	-
4	Desa		Desa Brondong	Desa Tersana
5	Kategori	Pertanian (Padi) dan hortikultura (cabai alas, terong, pare)	Pertanian (padi) dan perikanan (gurame, bandeng, nila). Palawija masih dirintis.	Pertanian dan peternakan (sapi; 20 sapi)
6	Jumlah anggota	1 gapoktan terdiri dari 18 kelompok tani. 1 kelompok tani terdiri dari kurang lebih 60 petani.	Di Pasekan terdapat 34 Poktan	Terdapat 46 Poktan aktif (terdiri dari 46 poktan tanaman pangan, taruna tani dan kwt)
7	Lahan	Lahan yang dikelola satu kelompok tani sekitar 50 ha. Satu gapoktan mengelola sekitar 928 ha.	Masing-masing poktan mengelola sekitar 30 Ha. Sewa lahan 9.000 m mencapai 15 juta per tahun. Lahan pertanian total mencapai 878 Ha sedangkan luas empang mencapai 17.000 Ha.	



8	Karakteristik	Mulai tahun 2018 sedang dikembangkan sentra cabai di Kroya	Tipe lahan dalam dan seperti panci. Sehingga kalau banjir menjadi sangat tinggi dan kalau kering menjadi sangat kekeringan. Sawah lebih tinggi daripada sungai.	Saluran air lebih rendah daripada sawah
9	Pemasaran	Terdapat pengepul yang membeli gabah. Untuk memasarkan produk, bekerja sama dengan orang-orang induk yang biasa melakukan pemasaran serta pasar daerah. Pasar yang dituju adalah pasar Semarang, Jakarta dan Bumiayu. Sekali pengiriman bisa mencapai 2 ton. Pemasaran terjadi pada bulan Oktober, Desember dan Februari.	Terdapat pengepul pada. Ikan dijual ke PT atau langsung dijual ke pasar. Aktivitas "ngijon" masih berlangsung.	Gabah dijual ketengkulang yang berada di luar kecamatan.
10	Program yang sudah diperoleh	Traktor roda 4, roda 2, pompa, power thresher, bantuan pinjampakai excavator.	Alat persemaian, tapi tampahnya masih kurang. Pengguna transplanter baru satu poktan.	Kartu tani untuk bantuan pupuk
11	Sistem tanam	2 musim padi, hortikultura di antaranya. Setelah tanam padi berakhir langsung tanam sayur-sayuran.	Panen 2 kali. Akibat dalamnya tanah, proses penanaman mencapai 1 bulan.	3 musim dalam 1 tahun



12	Irigasi	Awalnya pengairan pernah mengalami kesulitan (tadah hujan), sehingga dilakukan sedor air dengan harga Rp35.000 per jam. Saat ini, pengairan sudah cukup lancar akibat adanya bantuan dari pemerintah berupa pengeboran untuk air minum dan air sawah. Bahkan saat ini tiap RT sudah memiliki setidaknya satu sumur bor. Salah satu permasalahan irigasi adalah kurangnya saluran tersier akibat terbatasnya jumlah excavator yang dapat digunakan.	Awalnya daerah pasekan sering mengalami kekurangan air akibat pendangkalan air (pendangkalan air di bangkir jika terjadi banjir). Terdapat 3 pintu aliran irigasi bendungan bangkir, tapi yang dibuka hanya satu. Mulai tahun 2003, terdapat kelompok jasa pengairan (dikelola swadaya) di desa pasekan. Sumber air berasal dari sungai cimanuk. 10% hasil dari jasa irigasi tersebut menjadi pendapatan air desa.	Sistem irigasi 1/2 teknis dengan menggunakan pompa. Biaya permusim bisa mencapai 40 Kg hingga 1 kw.
13	Hama/Penyakit	Selain Patek, hama lain masih bisa diantisipasi. Namun dari tahun ke tahun harga pestisida semakin mahal.	Siklus hama musiman serta kondisi tanah membuat musim ketiga (untuk palawija) masih sulit untuk dilakukan	
14	Masalah alsin	Jumlah excavator masih terbatas (sistem pinjam pakai)	Apabila menggunakan sistem kebut banyak gabah yang hilang. Oleh sebab itu, poktan mengharapkan adanya bantuan tambahan power thresher.	



15	Pembiayaan	Modal pertanian bersumber dari pinjaman bank (KUR) dan rentenir. Proses peminjaman masih dilakukan secara individu.	modal awal berasal dari hutang kepada tengkulak dan juga bank (individu). Modal untuk penyediaan jasa air berasal dari pinjaman Bank (simpedes). Kartu tani baru saja dibagikan.	
16	SDM	Sebagian besar anggota kelompok petani adalah petani penggarap. Meskipun memiliki pekerjaan lain (misal PNS), warga tetap bekerja menjadi petani (atau memiliki sawah). Usia angkatan kerja banyak yang menjadi petani (termasuk usia di bawah 40 tahun). Upah petani penggarap selama setengah hari yaitu Rp70.000.	Petani lebih banyak yang berusia di atas 40 tahun. Anak-anak biasanya hanya membantu orang tua mereka bertani. Biaya buruh tani sekitar Rp100.000 per hari. Buruh ikan Rp150.000 sampai selesai pekerjaannya. Selain bertani, sebagian warga memiliki empang atau bekerja sebagai tukang (buat perahu), mengolah hasil tambah, dagang air, atau supir pengantaran produk pertanian. Tetapi padi masih lebih menguntungkan.	Sebagian besar pekerjaan petani, 1 orang mengolah 0.3 ha (sekitar). Petani dikategorikan menjadi petani pemilik dan penyewa. Untuk penyewa musiman; biaya sewa 1 musim yaitu sebesar 2,5 kw per 100 bata (1 bata=14 m ²) + ongkos pengairan sebesar 1 kw. Tetapi sistem pembayarannya biasanya dilakukan per tahun jadi untuk 2 musim.
17	Harga	Gabah Rp5.354 per Kg	Pernah paling rendah Rp390.000 per kw. Harga ikan di pasar Jakarta Rp26.000 per Kg (1 Kg sekitar 3-4 ikan, tapi sekarang 1 Kg yang terdiri 7-8 ekor sudah dijual). Biaya untuk 1 ha mencapai 7-8 juta	



18	Permasalahan lain	Cabai harus dijual segar karena usia cabai tidak lama. Belum ada inovasi pengolahan cabai.	Sulit mencari sumber untuk pengairan, akibat limbah pabrik Pertamina Balongan.	
19	Bantuan lain yang diharapkan	Kuota alsin harapannya dapat ditingkatkan khususnya excavator. Selain itu, program hortikultura perlu lebih diperhatikan seperti bantuan bibit cabai atau bantuan pemasaran dan modal. Bantuan bibit cabe pernah dilakukan tapi bantuan hanya meliputi wilayah 30 ha.	Ingin ada normalisasi sungai Cimanuk karena pengairan sekarang baru sampai Brondong. 49% lahan Brondong butuh dorongan air untuk menghadapi rob (mendorong air pantai dahulu). Dulu pernah gagal panen seluas 200 ha x 7 Ton. Bantuan benih juga diharapkan kuotanya meningkat. Selain itu, harga obat diharapkan semakin murah.	
	Keterangan			Partisipasi poktan terhadap penyuluhan dari BPP 60-70%. Penyuluhan biasanya dilakukan di awal, tengah dan akhir tahun.



No	Perihal	Sliyeg	Cikedung	Widasari
1	Nama	Bp Slamet Setiadi	Bp Muhaimin	Bp Yazid Bustami
2	Kontak	087718585816		081947205003
3	Kelompok Tani	Tunggal Rasa (2009)	Tani Mulus (2007)	Sri Rahayu (2009)
4	Desa	Desa Majasari		
5	Kategori	Pertanian (padi), Hortikultura (timun, sawi, kacang-kacangan), dan peternakan (sapi pedaging sekitar 150 ekor dan kambing)	Pertanian dan peternakan (ayam sentul dan kambing)	Pertanian dan Hortikultura (bawang, cabai)
6	Jumlah anggota	anggota poktan sebanyak 72 orang	1 gapoktan terdiri dari 3 poktan dengan anggota keseluruhan sebanyak 513 orang (anggota aktif sebanyak 156 orang)	64 orang. Di widasari terdapat 43 poktan, 6 kwt dan 1 pemuda tani.
7	Lahan	Lahan yang dikelola oleh poktan seluas 40 Ha dengan kapasitas produksi sebanyak 8-9 Ton per Ha. Lahan saat ini produktifitasnya semakin menurun akibat penggunaan pupuk kimia.	Jumlah lahan yang dikelola seluas 278 Ha.	Lahan yang dikelola seluas 40 ha untuk pertanian dan 5 ha untuk hortikultura. Struktur tanah agak berbeda, sehingga perlu dimodifikasi lahannya atau alat pertanian sehingga bisa digunakan.
8	Karakteristik	Tanah terlalu gembur sehingga sulit untuk menggunakan alat berat. Saat ini terdapat Sentra Pengolahan Beras Terpadu (baru berlangsung selama 2 bulan) yang mana harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak.	Produk sudah siap jual dalam bentuk beras dan sudah memiliki merek sendiri.	



9	Pemasaran	Palawija dijual ke pasar jatibarang, untuk padi dijual ke tengkulak. Terdapat 3-4 tengkulak besar.	Hasil pertanian dijual ke gapoktan di atas hpp (3700) yaitu sebesar 5400/Kg. Lalu dijual ke ritel-ritel di Jogja, majalengka, Cirebon, Kuningan, Transmart Bandung (14 Ton), Transmart Karawang (8 Ton) per minggu. Beras sudah memiliki merek sendiri. Produk sudah memiliki sertifikat PSAT Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kerjasama dengan BUMD, bisa menampung 20 hingga 50 Ton. 10 pabrik bisa memproduksi 25 Ton beras, sudah masuk pasar Cipinang. Manajemen Pabrik menerapkan manajemen modern.
10	Program yang sudah diperoleh	Bantuan pupuk, bantuan obat, kartu tani (dapat memperoleh KUR walau petani penggarap, karena tidak perlu agunan)	Benih (bukan berasal dari Indramayu, biasanya dari Sadang), irigasi dan pompa.	Benih, KUR (sebagian), asuransi jasindo, Pelatihan PJRR, Pengawasan Pujalae seluas 250 Ha (program 2019).
11	Sistem tanam	2 musim dalam 1 tahun.		2 musim tanam (tetapi sedang diusahakan untuk 3 kali)
12	Irigasi	Pernah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun 2012. Irigasi menggunakan sumur dengan kedalaman 18 m.	Irigasi masih belum merata di beberapa tempat.	Sistem perbaikan irigasi berbelit, misal ada irigasi rusak, ada petani yang mengadu ke BPD/BPP tapi harus dikoordinasikan dengan Dinas PU Pengairan. Namun harus menunggu anggaran tahun depannya lagi (sehingga terjadi saling lembar koordinasi).
13	Hama/Penyakit	Hama wereng masih menjadi masalah.	Pestisida makin mahal padahal hama itu perlu penanganan yang cepat.	



14	Masalah alsin	Alsin berat sulit digunakan akibat lahan gembur.		Transplanter banyak yang mangkrak (padahal program nasional). Hal itu bisa disebabkan oleh struktur tanah yang kurang mendukung.
15	Pembiayaan	Modal pinjam ke keluarga atau kerabat. Namun saat ini sudah terdapat kartu tani sehingga petani penggarap dapat menggunakan KUR.	Melalui KUR (Bank BRI) tanpa agunan dengan jaminan dari gapoktan. Pada mulanya, petani penggarap belum berani memanfaatkan KUR: 1) petani penggarap masih diragukan, 2) petani takut bersinggungan dengan bank, 3) petani sebagian besar petani penggarap sehingga tidak memiliki agunan. Namun saat ini, penerapan KUR sudah meningkat dengan dibantu dan difasilitasi oleh gapoktan. KUR batas atasnya mencapai 25 juta dan pelunasan dapat dilakukan setelah panen.	KUR masih dianggap ribet sehingga masih banyak yang meminjam rekan. Selain itu, hanya ada 2 dari 10 desa yang menggunakan dana desa untuk kegiatan pertanian.



16	SDM	<p>Petani sebagian besar adalah petani penggarap dan berusia di atas 40 tahun. Terdapat 2 sistem yaitu sistem sewa dan sistem bagi hasil. Untuk sistem sewa, apabila kondisi lahan bagus maka biaya sewa mencapai 4 Ton per Ha (apabila 1 Kwintal : Rp500.000, maka harga sewa kurang lebih 20 juta). Untuk sistem bagi hasil, masing-masing memperoleh 50% namun sudah dikurangi modal. Upah untuk buruh tanam biasanya sebesar 800rb per Ha (5 orang bisa mengerjakan 1/3 Ha dalam 3 jam).</p>	<p>Petani usia di bawah 40 tahun tidak ada. Masih sulit menstimulasi SDM pertanian. Selama ini penyuluhan masih fokus pada kelompok-kelompok yang sudah baku (itu-itu saja dan sudah tua). Perlu digiatkan komunitas petani muda yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah.</p>	<p>Buruh tani dibayar 80rb per setengah hari. Sektor pertanian masih ditopang orang-orang tua.</p>
17	Harga	<p>Jual gabah biasanya januari-feb dengan harga sekitar 600-700rb per kw. Paling murah pernah 430rb per kw.</p>	<p>Harga jual beras 11.800 per Kg ke luar</p>	<p>1 Ha modalnya 12 juta, hasilnya bisa 2-3 kali lipat. Pendapatan bersih harian mencapai 40-60 rb (setelah dikurangi biaya dalam satu tahun)</p>
18	Permasalahan lain	<p>Bibit muncul -> rentan penyakit tetapi hasilnya lebih banyak. IR lebih bagus tetapi hasil sedikit. Perlu bibit unggul yang lebih baik. Produktifitas lahan turun akibat penggunaan pupuk kimia terus menerus, tetapi sulit untuk kembali ke organik (tumbuh lebih lama meskipun harga pupuknya lebih murah).</p>	<p>Dinamika proses belum seragam, perlu adanya satu koordinasi sehingga hasilnya lebih baik. Saat ini masih individual antar petani. Pengemasan beras masih menggunakan sablon, apabila menggunakan printing modal yang dibutuhkan besar.</p>	<p>Musim hujan di Indramayu pernah sampai banjir pada tahun 2015, dan pernah pula gagal panen pada tahun 2014. Namun, 256 Ha (100%) sudah seluruhnya masuk asuransi jasindo.</p>



19	Bantuan lain yang diharapkan	Irigasi dapat diperbaiki. Sumber air bor semakin jauh dari pemukiman semakin sulit. Bor minimal 18 m (air payau). Harapannya terdapat generasi penerus petani karna saat ini mencari buruh tani semakin sulit.	Benih diharapkan berasal dari dalam indramayu dan kedepannya diharapkan ada bantuan untuk mewujudkan wisata pertanian.	Bimbingan teknis ke petani terkait manajemen tani serta penyuluhan untuk mengubah mindset petani. Serta perlu kebijakan yang berpihak pada petani (seperti peningkatan anggaran).
	Keterangan		Bingung dengan hubungan antara koperasi dan bumdes. Kalau sudah ada koperasi kenapa perlu ada bumdes ?	Pertanian dan Hortikultura (bawang, cabai)
			Kemasan 1 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg, 10 Kg, dan 25 Kg	Koordinasi antara regulator dan petani masih belum nyambung. Untuk menjelaskan metode baru harus menggunakan contoh.
			Binaan UNPAD	Kejayaan widasari tahun 1980-1990
			Harapannya ada dana talangan dari bank khususnya berkaitan dengan jual ke ritel besar seperti transmart. Biasanya kas turun paling cepat 1 bulan. Sehingga memperlambat perputaran	Dulu petani yang menentukan harga, sekarang pedagang di jakarta yang menentukan harga. Petani tetua-tetua sudah meninggal lalu diteruskan oleh anak-anaknya. Namun, pengalaman anak-anak masih kurang sehingga kurang maksimal.
				1 Ha Thailand memproduksi 14 Ton
				1 Ha Widasari memproduksi 6-7 Ton
				Sawah lebih menguntungkan daripada pekerjaan lain di widasari



MEP FEB UGM

MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA



KABUPATEN INDRAMAYU 2018